



**LEGITIMASI KEKUASAAN LEMBAGA ADAT ATAS
KEPEMIMPINAN AMMATOA DI DESA TANA TOA
KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian Persyaratan
Untuk mencapai Derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Pemerintahan



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	3 Maret 2009
Dari	Sasrul
Jumlahnya	1 dus
Harga	Gratis
No. Inventaris	37
Dasar	SKK-509

Oleh

Asnawi Rizal
E12103023

RIZ
L

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi

**LEGITIMASI KEKUASAAN LEMBAGA ADAT ATAS KEPEMIMPINAN
AMMATOA DIDESA TANA TOA KECAMATAN KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Asnawi Rizal
E 121 03 023**

telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
pada tanggal 24 Februari 2009
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Pembimbing I

Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si
NIP. 131 414 620

Pembimbing II

Dra. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 131 658 806

Mengetahui:



Ketua Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Dr. ARMIN ARSYAD, M.Si.
NIP. 131 961 985

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, M.Si.
NIP. 131 864 112

LEMBARAN PENERIMAAN

Skripsi

**LEGITIMASI KEKUASAAN LEMBAGA ADAT ATAS KEPEMIMPINAN
AMMATOA DI DESA TANA TOA KECAMATAN KAJANG
KABUPATEN BULUKUMBA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Asnawi Rizal
E 121 03 023**

telah diperbaiki
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009

Menyetujui:

PANITIA UJIAN:

Ketua	: Drs. H. Andi Syamsu Alam, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Andi Murfhi, S.Sos, M.Si	(.....)
Anggota	: H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si	(.....)
Anggota	: Dra. Hj. Nurlinah, M.Si	(.....)
Anggota	: Drs. Andi Muh. Rusli, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Hj. Nurlinah, M.Si	(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu alaikum, Wr, Wb

Bismillahi Tawakkaltu A'la Allah, syukur kupanjatkan kepada **ALLAH SWT** tempat muara segala muara yang sungainya mengalir limpahan rahmat dan memberi jalan pada hati yang senantiasa tunduk mengayuh biduk RidhoNYA. Karena izin-MU lah hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Hambatan dan kendala tentunya telah menjadi warna dalam hidup ini untuk senantiasa menjadikannya pelajaran dan mengambil hikmah. Syukur alhamdulillah, Cinta sejatiku hanya pada_MU.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orangtuaku, Bapak Tercinta "**Muh Alwi**" dan Ibunda "**Rabiah**" atas doa, cinta dan kasih sayang yang begitu tulus...*"Kerut dipipi kalian mengisyaratkan kelelahan yang sangat, tenaga yang mulai habis seolah tak lagi sanggup sekedar mengangkat tubuh rapuhmu. Dibola matamu, tampak jelas guratan berat kehidupan yang telah dilalui. Semua hanya untuk ku...Terimakasih". Kakakku "Muh Dirham Nur"... Semangat terbesar ada pada raut wajah Mama dan ayah, jaga dan sayangilah beliau!*

Dari awal sampai pada penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan tuntunan serta bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak Deddy. T. Tikson. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
3. Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Drs. H. Andi Syamsu Alam, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.S, dan Ibu Dra. Hj. Nurlinah, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang tiada lelah memberi bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu Dosen serta Staf pegawai dalam lingkungan Fisip Unhas.
7. Ammatoa dan seluruh Pemangku adat Masyarakat Kajang dan Kepala Desa Tana Toa, bapak Abd Salam yang telah banyak membantu selama penulis berada di lokasi penelitian.
8. Bapak Ir Abdul Rahim dan Bapak Aziz Tambi terima kasih atas segala bantuannya.
9. Teman dan sekaligus saudaraku "*Haryanto, Andis dan Ilo*" sumbangan pemikiran dan jasmulah sehingga karya tulis ini akhirnya selesai.
10. *Warga Himapem,*
Kanda-kanda Senior yang banyak memberikan pelajaran kepada penulis untuk menuju kedewasaan, *Bagaimanapun dan siapapun engkau kanda, kalian adalah motivator terbesar dalam proses pembelajaranku dikampus merah ini...Spesia Kak Uci (97), Kak Fabol (99), Kak Rini (00), Kak Afif (01), Dan Kak Aziz (02). Serta Adik-adikku "04, 05,06, 07 dan 08" Jangan menetap menggelepar menggantung disayap orang, kembangkan sayapmu sendiri dan terbanglah lepas seraya menghirup udara bebas ditaman luas.*
11. Saudara-saudaraku "*Konstitusi 03*",
"Hardiansyah, Suaib Sulkifli, Ahmad Heri Siswanto, Bahri, Andi Bangsawan, Aslam, Naharuddin, Affan Leikawa, Sukri, Muhajir, Sandi, Arif Budianto, Haeruddin, Ridwan Nurhan, Alam Suparlin, Nober Kapuangan, Abdul Rahman, Fitria, Citra Warsita, Satriani, Sundari, Asriani Ruse, Heppy, Nurdana, Salfina, Iftitah, Fadila, Kiky, Eva,



Suryana. "(Kebersamaan yang telah kita lalui akan menjadi kenangan yang tak terlupakan, ingatlah hari di mana ku selalu tersenyum manis buat kalian).

13. Warga "Kecamatan Batang khususnya Desa Camba-Camba Jeneponto" (Pak Desa Sekeluarga, Daeng Intang, Karaeng Limpo sekeluarga, teman KKN (Ardi, Andis, Bambang, Ijah Rahayu, Reni, wawan, Anto, Pay, dll), *"pertemuan yang sesaat namun sangat membekas dalam ingatanku"*.
14. Teman-teman angkatan 03 Fisip : Anto, Haves, Umar (Antro), Andis, Anca, Ramlan, Muliadi, Uki (ADM)
15. Saudara-saudaraku di Forum Mahasiswa Ballatta : Anto, Uppi, Aslam, Asti, Uci, dll
16. Teman-teman di Pondokan : Agung, Faisal, S.T, Masnawi, Achmas Yusuf, S.P, Acox, Tanil, S.Pi, dll
17. Semua pihak yang senantiasa didekatku dalam menapaki hidup yang sesungguhnya, kalian memberikan makna terdalam dalam hati dan pikiran ini.

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sadar akan segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf dan tentunya menerima segala bentuk saran dan kritik dari segala pihak, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bernilai ibadah disisi_Nya, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 01 Februari 2009

Penulis

Intisari

Asnawi Rizal (E 121 03 023). Legitimasi Kekuasaan Lembaga Adat atas Kepemimpinan Ammatoa di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. (Pembimbing : Prof. Dr. Djuanda Nawawi, M.Si dan Dra. Hj. Nurlinah, M.Si)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui legitimasi kepemimpinan Ammatoa dalam konteks pemerintahan dan bagaimana struktur kelembagaannya. Indikator legitimasi kepemimpinan adalah legitimasi tradisional yang berlandaskan pada faktor keturunan, legitimasi kharismatik yang berlandaskan pada perasaan kagum, hormat, cinta masyarakat terhadap seorang individu, legitimasi rasional yang berlandaskan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin seperti kejujuran, kesabaran dan ketegasan.

Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik kualitatif. Adapun informan yang diwawancarai adalah Ammatoa sebagai informan kunci dan tokoh-tokoh masyarakat dalam lingkup kawasan adat Kajang.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat adat di Kajang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat. Legitimasi tradisional yang didapatkan Ammatoa adalah karena faktor keturunan dan aliran kepercayaan setempat yaitu kepercayaan *patuntung*. Legitimasi kharismatik Ammatoa karena faktor kesaktian, yang diukur dari kepemilikan benda pusaka keris (*badik*) dan tombak (*balira*) dan kemampuan Ammatoa memimpin upacara adat serta kesaktian berhubungan dengan ilmu santet, charisma Ammatoa juga berhubungan dengan aspek wajah, postur tubuh, penampilan atau sikap. Legitimasi rasional di dapatkan Ammatoa termuat dalam pasang yaitu ketegasan (*rigatangna nu ada'*), kejujuran (*ri lambusu'nu nu karaeng*), kesabaran (*risabbara'na nu guru*), dan sikap pasrah atau lapang dada (*riapisona nagauru*). Sedangkan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya, Ammatoa di Bantu oleh beberapa pemangku-pemangku adat, seperti *Karang Tallua*, *ada' limaya ri tanah lohea*, *ada' limaya ri tana kekeya dan anrongta*, semua perangkat adat ini mempunyai tugas dan peranan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
INTISARI	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konsep	9
F. Metode Penelitian	17
G. Defenisi Operasional	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Konsep Legitimasi	21
B. Konsep Kekuasaan	24
C. Konsep Kepemimpinan	28
D. Konsep Kelembagaan	41
E. Konsep MasyarAkat Adat	48
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	52
A. Keadaan Geografis	52
B. Mata Pencaharian	55

C. Pendidikan	56
D. Latar Belakang sejarah	57
E. Agama dan Kepercayaan	60
BAB V PEMBAHASAN	62
A. Legitimasi Kepemimpinan	62
1. Legitimasi Tradisional	65
2. Legitimasi Kharismatik	74
3. Legitimasi Rasional	81
B. Struktur Kelembagaan	89
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adat atau *Indigenous peoples* adalah komunitas yang telah lama ada di seluruh wilayah nusantara, bahkan jauh sebelum masa kerajaan atau kesultanan ada. Mereka hidup secara mandiri dengan mengatur dan mengurus dirinya serta mengelola tanah dan sumberdaya alam lainnya di kelompok masing-masing. Masyarakat tersebut mengembangkan sendiri sistem hukum dan kelembagaannya untuk menjaga keharmonisan sehingga tercipta keselarasan antara sesama warga dan lingkungan sekitar. Mereka hidup dengan pewarisan yang turun temurun dari leluhur dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk tetap mempertahankan adat istiadatnya.

Penamaan terhadap masyarakat adat dengan sistem sosial politik yang khas ini berbeda dari satu daerah ke daerah lain, misalnya di sebagian besar Aceh dikenal *Kemukiman/Gampong*, di Tanah Batak Toba dikenal dengan *Huta/ Horja/Bius*, di Minangkabau dikenal dengan *Nagari*, di Siberut Kepulauan Mentawai dikenal dengan *Laggai/Uma*, di Sumatera bagian tengah dan selatan dikenal dengan *Marga/Kebatinan/Negeri*, di pedalaman Borneo dikenal beragam penamaan seperti *Banua, Binua, Ketemenggungan, Balai, Lowu, Lewu*, di Tana Toraja dikenal dengan *Lembang/Penanian*, di

Kepulauan Kei dikenal dengan *Ratchap/Ohoi*, dan Masyarakat Adat Kajang di Bulukumba¹.

Pada awalnya kesatuan masyarakat lokal/adat (desa, nagari, binua, kampung, gampong, negeri, huta, sosor, marga, lembang, kuwu, pemusungan, yo, paraingu, lumban, dan lain-lain) yang tersebar di penjuru nusantara mempunyai karakter yang hampir sama. Mereka adalah kesatuan masyarakat yang tergabung berdasarkan garis keturunan (*genealogi*) yang mendiami wilayah (*teritori*) tertentu. Semuanya merupakan organisasi masyarakat lokal yang mempunyai kekuasaan sendiri yang berdasar pada adat-istiadat setempat.

Pada masa Orde Baru hegemoni kekuasaan pemerintah telah membelenggu kekuatan lokal yang berbasis pada adat, ikatan keagamaan, solidaritas sosial dan lain sebagainya. Kekuasaan yang secara sentralistik itu telah jauh melakukan penetrasi dalam sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Legitimasi kekuasaan yang menggunakan kekerasan, penindasan dan dominasi yang begitu kuat baik yang berbentuk fisik maupun non fisik dalam menjalankan aturan pemerintahan, menyebabkan ketaatan masyarakat terhadap pemerintah sangat terpaksa, karena di hantui oleh rasa takut terhadap pemegang kekuasaan. Apalagi setelah berlakunya berlakunya

¹ Journal World Agroforestry Centre (ICRAF)., Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)., Forest Peoples Programme - (FPP), -- *Satu Yang Kami Tuntut Pengakuan*, 2003. Online (<http://www.aman.or.id>), diakses 10 Juli 2008.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, praktis kekuasaan lembaga adat di seluruh nusantara tidak lagi mempunyai kekuasaan politik yang dominan dan mulai dicabut sebagian hak-haknya. Akibatnya masyarakat cenderung memilih cara lain untuk dijadikan sebagai sarana legitimasi demi mencapai kebutuhan hidupnya, seperti menghidupkan kembali ritual-ritual adat istiadat. Atau terkadang masyarakat cenderung taat kepada seseorang yang memiliki karismatik karena diakui dapat melindungi hak-hak dan kebutuhannya.

Masyarakat adat Kajang juga mengalami hal yang sama. Praktis, kekuasaan lembaga adat berkurang walaupun dalam hal-hal tertentu masih dominan dalam mengatur masyarakatnya. Ammatoa dalam artian sebagai gelaran, adalah gelar seseorang yang diakui dan diangkat oleh masyarakat sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat adat di Kajang. Dia diangkat dan diakui sebagai pemimpin/Bapak yang dituakan oleh oleh masyarakatnya. Dia dituakan bukan karena usianya, tetapi dituakan karena dia mempunyai pandangan luas serta pengetahuan yang mendalam disamping memiliki persyaratan-persyaratan tertentu yang diperlukan oleh masyarakat yang dipimpinnya. kepadanya diadakan suka dan duka, meminta nasehat dalam ajaran-ajaran dalam segala hal. Dialah yang didengar dan diturut, tetapi oleh pengikutnya tidak dipandang sebagai dewa atau Tuhan yang harus dipuja. Ammatoa adalah manusia biasa yang dalam kalangan pengikutnya

mempunyai kelebihan, terutama dalam soal meramal kejadian-kejadian yang akan terjadi pada rakyat Kajang². Sedangkan dalam artian sebagai institusi, Ammatoa adalah sebuah lembaga, tempat musyawarah mufakat dalam membahas masalah adat. Lembaga adat Ammatoa mempunyai struktur kelembagaan dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Struktur kelembagaan Ammatoa mirip dengan pemerintahan formal dimana ammatoa berfungsi sebagai pemimpin tertinggi.

Lembaga-lembaga sosial yang diatur dalam *Pasang* (Hukum adat) nampaknya lebih berfungsi sebagai lembaga politik dari pada lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial disini dimaksudkan sebagai lembaga yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan kenyataannya lembaga-lembaga sosial dalam *pasang* lebih menonjolkan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan atau lembaga politik dan pucuk pimpinan tertingginya adalah ammatoa³.

Ammatoa dalam kapasitasnya sangat membantu pemerintah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di desa karena lembaga adat Ammatoa masih sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat setempat. Oleh karena wibawa yang dimiliki oleh lembaga adat ini begitu disegani, maka masyarakat akan taat pada kebijakan yang diambilnya, sehingga

² Sitti Aminah, *Nilai-Nilai Luhur Budaya Spritual Masyarakat Ammatoa Kajang*, (Ujung Pandang Kanwil Depdikbud Sul-Sel, 1989)

³ Mas Alim Katu, *Tasawuf Kajang*, (Makassar, Pustaka Refleksi, 2005) hal : 64

membantu pemerintah melaksanakan program pemerintahan yang baik (*good governance*). Peranan lembaga adat Ammatoa yang begitu besar dan luas, selain dapat membantu pemerintah mengatur masyarakat agar mentaati peraturan, juga sangat berperan dalam menyelesaikan berbagai kasus dan sengketa yang terjadi sehingga beban pemerintah ikut berkurang.

Lembaga adat Ammatoa mempunyai semacam kekuasaan untuk menggerakkan orang lain agar sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya setempat sehingga masyarakat adat Kajang mampu bertahan menghadapi arus globalisasi. Selain hal tersebut, kekuasaan lembaga adat Amamotoa juga berfungsi sebagai pelayan masyarakat dalam hal menjaga *Pasang ri Kajang* (hukum adat) agar masyarakat tertib dan teratur. Fungsi ini tidak akan hilang walaupun kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat meningkat dalam batas-batas ketentuan adat.

Ammatoa sebagai pemimpin masyarakat adat, karena wibawa kesabarannya, ketegasannya serta keteladanan pemangku adat, sehingga memberikan pengaruh positif pada upaya pelestarian lingkungan, utamanya pelestarian hutan mereka. Demikian juga kekuasaan Ammatoa bukanlah jabatan yang sarat dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi posisi kehormatan yang sarat dengan tanggungjawab untuk mengurus dan melindungi tanah, penduduk, keamanan, hubungan-hubungan sosial, dan sebagainya.

Dalam setiap kajian mengenai kekuasaan baik formal maupun informal, terdapat suatu fenomena yang unik dimana kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain seringkali tidak disertai dengan kewibawaan, sehingga tingkat ketaatan dan kepatuhan seseorang sering tidak dilandasi oleh kesadaran secara suka rela melainkan karena pemaksaan oleh instrumen atau alat-alat kekuasaan. Selanjutnya, jika pembahasan telah memasuki dimensi ketaatan atau ketertundukan seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, menjadi mutlak untuk diketahui tentang *authority* (otoritas, kewenangan) atau *legitimacy* (keabsahan), wewenang atau legitimasi adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*). Atau wewenang adalah kekuasaan formal (*formal power*), dalam arti dimilikinya hak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta dimilikinya hak untuk mengharap kepatuhan orang lain terhadap peraturan yang dibuatnya.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah, mengapa seseorang atau suatu kelompok memiliki wewenang yang lebih besar dan mampu memaksa orang atau kelompok lain untuk tunduk dan taat kepadanya, serta dari mana orang atau kelompok tadi memperoleh landasan legitimasi untuk melaksanakan kekuasaannya? Hal tersebut juga yang terjadi dalam lembaga adat Ammatoa.



Bertolak dari latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetengahkan masalah di atas dalam bentuk skripsi dengan judul

"Legitimasi Kekuasaan Lembaga Adat Atas Kepemimpinan Ammatoa Di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legitimasi kepemimpinan Ammatoa dalam konteks pemerintahan di Desa Tana Toa?
2. Bagaimana struktur kelembagaan Ammatoa di Desa Tana Toa.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui legitimasi kepemimpinan Ammatoa dalam konteks pemerintahan.
2. Untuk mengetahui struktur kelembagaan Ammatoa di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kampus dan bangsa Indonesia dalam rangka menunjang pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Dari segi praktis, supaya dapat menambah pengetahuan peneliti tentang bidang studi kepemimpinan khususnya legitimasi kepemimpinan ammatoa.

E. KERANGKA KONSEP

Kekuasaan adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat dalam bentuk hidup bersama. Kekuasaan dapat berbentuk hubungan dalam arti ada satu pihak yang berkuasa dan yang lain dikuasai (diperintah), dengan demikian manusia merupakan subyek sekaligus obyek dari kekuasaan misalnya; pemerintah membuat suatu undang-undang (subyek), disamping itu juga dia harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang (obyek). **Max Weber** merumuskan bahwa kekuasaan merupakan *kemampuan individu dalam hubungan sosial untuk mewujudkan keinginannya di dalam suatu tindakan komunal meskipun melawan arus tentangan dan resistensi individu lain yang terlibat dalam tindakan tersebut*⁴. Sedangkan **Foucault**, melihat *kekuasaan sebagai seluruh tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi atau bisa juga dengan melalui paksaan dan larangan*⁵. Lebih jauh **Foucault** mengatakan bahwa *kekuasaan mencakup semua hal dan datang dari mana-mana*. Dengan demikian kekuasaan dapat diartikan, sebagai upaya seseorang ataupun kelompok untuk menguasai orang lain dalam berbagai bentuk yang karenanya terjadi pertentangan antara keduanya

⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama,1987).h.53

⁵ Lihat Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, cet.2,(Jakarta; Kompas,2004).h.217

dimana salah satunya dapat menguasai yang lain sehingga terjadi dominasi pada pihak lain.

Sedangkan defenisi legitimasi atau keabsahan seperti yang dikumpulkan oleh **Budiardjo** dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati.
2. Legitimasi adalah *the conviction on the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime* (David Easton, *System Analysis of Political Life*, 1965).
3. Legitimasi mencakup *the capacity to produce and maintain a belief, that the existing political institutions or forms are the most appropriate for the society* (Seymour Martin Lipset, *Political Man : The Social Basis of Politics*, 1969)⁶.

Membicarakan legitimasi kekuasaan dalam suatu masyarakat, tidak akan terlepas dari kepemimpinan sebagai motor penggeraknya. Karena sepanjang sejarah peradaban manusia, gerak hidup dan dinamika kekuasaan sedikit banyak tergantung pada sekelompok kecil manusia penyelenggara organisasi. Bahkan dapat dikatakan kemajuan umat manusia datangnya dari sejumlah kecil orang-orang istimewa yang tampil kedepan. Orang-orang ini

⁶ Miriam Budiharjo, *Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta, Gramedia, 1994) hal : 90-91

adalah perintis, pelopor, ahli-ahli pikir, pencipta dan ahli organisasi. Sekelompok orang-orang istimewa inilah yang disebut pemimpin. Oleh karenanya kepemimpinan seorang merupakan kunci dari langgennya kekuasaan. Para pemimpin dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bertanggungjawab kepada atasannya dan tercapainya tujuan organisasi, mereka juga bertanggungjawab terhadap masalah-masalah internal organisasi termasuk didalamnya tanggungjawab terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia. Secara eksternal, para pemimpin memiliki tanggungjawab sosial kemasyarakatan atau akuntabilitas publik.

Menurut **Henry Pratt Fairchild** dalam **Kartono**, Bahwa seorang pemimpin adalah :

Dalam pengertian luas pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Sedangkan dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya, dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.⁷

⁷ Henry Pratt Fairchild sebagai mana dikutip Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1992) hal : 33

Pendapat lain tentang defenisi kepemimpinan dikemukakan oleh **soetopo** dan **soemantri** bahwa :

Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong dan mengajak, menuntung, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruh tersebut, selanjutnya membuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu⁸.

Berdasarkan defenisi diatas kekuasaan tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan karena berhasilnya sebuah kekuasaan tergantung dari efektifnya sebuah kepemimpinan, karena kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal ini pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstrukturkan aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan didalam sebuah kelompok atau organisasi. Usaha seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain adalah tehnik seni dalam pemerintahan dengan tujuan agar bawahan mengikuti apa yang diperintahkan. Tehnik seni berpemerintahan akan sangat tergantung dari legitimasi kepemimpinan yang digunakan.

Membicarakan kekuasaan dalam kepemimpinan adat tidak akan terlepas dari lembaga sosial sebagai tempat berkembangnya proses-proses kepemimpinan. Menurut **Abdulsyani** istilah lembaga berasal dari kata *institution* yang menunjuk dalam pengertian tentang sesuatu yang telah

⁸ Soetopoe, Soemantri, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta, Bina Aksara, 1984) hal : 01

mapan (*established*). Dalam pengertian sosiologis lembaga dapat dilukiskan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga pada mulanya terbentuk dari suatu kebiasaan yang terus-menerus sampai menjadi adat istiadat; kemudian berkembang menjadi tata kelakuan (*mores*)⁹.

Dalam sistem tradisional biasanya mengandung unsur-unsur : adanya alam pikiran yang magis, ikatan individu yang masih kuat, adanya larangan dan kewajiban yang membawa konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari (adat). Hal ini juga berlaku pada masyarakat ammatoa, karena dalam kehidupan sehari-hari adat masih dipegang kuat dan hal tersebut yang juga digunakan dalam menentukan pemimpin mereka. Adat yang diterima secara tidak tertulis biasa di sebut dengan *pasang*. *Pasang* inilah yang menjadi landasan pada masyarakat dalam mengatur kehidupan agar tertib dan teratur, hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh **Koenjaraningrat** bahwa adat adalah wujud ideal dari kebudayaan yang berlaku sebagai tatanan kelakuan¹⁰. **Siagian** juga mengungkapkan bahwa adat istiadat adalah bagian penting dari budaya masyarakat karena dianggap dapat memelihara kesatuan sosial melalui adat istiadat tersebut¹¹. Kepemimpinan yang mendapat legitimasi penuh dari masyarakat akan mudah dan responsif dalam menyelesaikan setiap masalah dan dipatuhi oleh masyarakatnya.

⁹ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2002), hal : 75

¹⁰ Koenjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indoenesia*, (Jakarta, PT. Jambatan, 1980) hal : 27

¹¹ Sondang. P. Siagia, *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005) hal : 33

Dalam kaitan dengan legitimasi kekuasaan. **Max Weber**, membagi legitimasi atas tiga bentuk, *Pertama*; legitimasi tradisional, yaitu; berasal dari tradisi kepercayaan, adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat. *Kedua*; legitimasi karismatik, berasal dari individu yang diakui oleh masyarakat memiliki ciri-ciri khusus yang luar biasa. *Ketiga*; rasional –legal berasal dari peraturan normatif secara rasional¹². Lebih lanjut lanjut **Weber** menegaskan bahwa "*adalah sudah sesuatu yang jamak bahwa setiap kekuasaan, atau bahkan setiap keberuntungan hidup perlu menjustifikasi dirinya*"¹³. Persoalan apakah apakah landasan tersebut cukup mampu menstabilkan keyakinan terhadap legitimasi, sepenuhnya tergantung pada praduga serta disposisi tingkah laku yang teramati dari kelompok yang sedang dipersoalkan. Oleh sebab itu bila dikaitkan dengan konteks masyarakat adat rumusan Weber ini dapat dijadikan alat analisa untuk melihat bentuk-bentuk legitimasi yang digunakan selama ini.

Legitimasi kekuasaan yang didapatkan oleh lembaga Ammatoa karena kepatuhan pemangku-pemangku adat dalam struktur kelembagaan Ammatoa terhadap hukum-hukum adat dan pantang untuk menyalahi aturan-aturannya. Persyaratan untuk dipilih menjadi pemangku adat harus didasarkan pada: faktor keturunan, mempunyai sifat-sifat jujur, adil, sabar, pasrah atau

¹² Franz Magnis, Suseno, *Opcit.* hal : 5

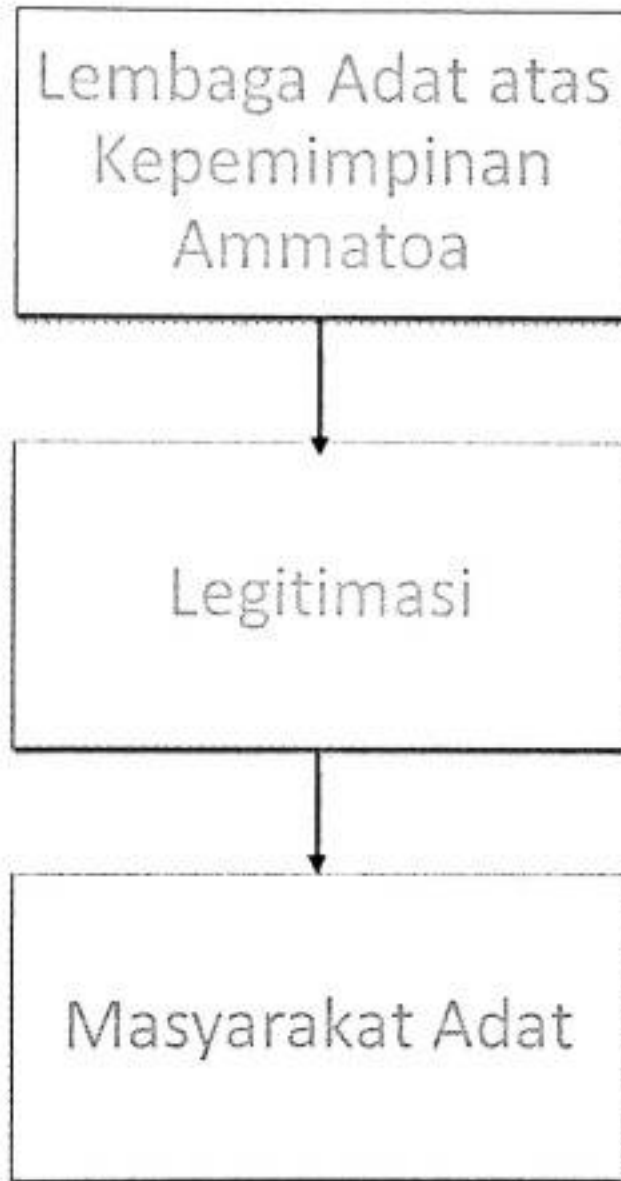
¹³ Jurgen Habermas, *Krisis Legitimasi*, (Yogyakarta, Qalam, 2004) hal : 279

tawakkal kepada Tuhan (*Turie'A'ra'na*), ahli dalam hukum adat (*pasang*) serta konsisten dalam menjalankan dan memiliki ilmu kesaktian. Hal tersebut senada dengan **Kartini Kartono** juga mengatakan bahwa pimpinan informal tradisional mendapatkan Status sosial itu pada umumnya dicapai karena faktor keturunan, kekayaan, taraf pendidikan, pengalaman hidup, kharismatik, maupun jasa-jasanya kepada masyarakat. Sehingga pemimpin dan kepemimpinan informal/ tradisional cirinya adalah tidak memiliki penunjukan formal legitimasi sebagai pemimpin, masyarakat menunjuk dan mengakuinya sebagai pimpinannya, tidak mendapat dukungan dari organisasi formal, tidak dapat dimutasikan atau promosi. atau tidak mempunyai atasan dan apabila melakukan kesalahan tidak dapat dihukum (hanya saja akan ditinggalakan kelompoknya)¹⁴.

Guna menunjang kerangka konsep ini menjadi semakin jelas, maka akan diuraikan dalam skema sebagai acuan untuk menganalisis masalah penelitian, dengan tujuan agar penelitian menjadi semakin sistematis dan terurai dengan jelas.

¹⁴ Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal itu?)*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal : 9-10.

Kerangka Konseptual



F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah dalam wilayah Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

2. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe dan dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu pengumpulan data (*observasi dan wawancara*) dari sejumlah responden yang dianggap dapat memberikan informasi yang valid atau data yang akurat yang berhubungan dengan masalah penelitian ini serta memberikan gambaran yang jelas tentang dan legitimasi kekuasaan atas kepemimpinan Ammatoa dan struktur kelembagaannya.

3. Informan

Untuk mendapatkan informasi lebih akurat maka penyusun melakukan wawancara kepada informan. Dalam melakukan wawancara dengan menggunakan tehnik bola salju yaitu dimulai dari informan kunci yaitu Ammatoa dan berlanjut kepada tokoh masyarakat atau pemangku adat setempat yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu pendekatan kepustakaan yang berdasarkan literatur dan referensi berupa buku-buku, majalah, surat kabar, serta artikel- artikel yang berkaitan dengan topik yang dibahas.
- b. Studi lapangan, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung yang dilakukan di wilayah penelitian. Wawancara (interview), adalah berupa tanya jawab langsung kepada orang-orang atau pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diseleksi sesuai dengan pengelompokkannya dan selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dengan teknik kualitatif. Deskriptif adalah dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.¹⁵

¹⁵ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT.RajaGraindo Persada, 2003) hal : 20

G. Definis Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur atau dengan kata lain adalah sebuah defenisi yang dibuat dengan tujuan mengoperasionalkan konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian yang digunakan agar dapat diukur dalam menjawab masalah.

- a. Legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati.
- b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu.
- c. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong dan mengajak, menuntung, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruh tersebut.
- d. Bentuk-bentuk legitimasi kekuasaan atas kepemimpinan yaitu :
 1. Legitimasi tradisional, yaitu keyakinan dalam suatu masyarakat tradisional, bahwa pihak yang menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk memerintah. Legitimasi ini didasarkan pada faktor keturunan.

2. Legitimasi kharismatik, berdasarkan pada perasaan kagum, hormat, cinta masyarakat terhadap seseorang individu yang sangat mengesankan sehingga masyarakat dengan sendirinya bersedia untuk mentaatinya. Dalam masyarakat adat Kajang, kharisma seseorang di ukur dari kemampuan memimpin upacara-upacara adat dan ilmu kesaktian yang dimiliki Ammatoa sehingga menjadi suritauladan dalam kehidupan bermasyarakat.
 3. Legitimasi Rasional – legal, berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin. Legitimasi ini didasarkan pada syarat-syarat kepemimpinan modern. Dalam masyarakat Kajang legitimasi rasional didasarkan pada : Kejujuran, ketegasan, kesabaran, dan wawasan pengetahuan yang luas yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum adat (*Pasang Ri Kajang*).
- e. Lembaga Adat Ammatoa adalah wadah lembaga permusyawaratan / permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat / masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan.
 - f. Masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. KONSEP LEGITIMASI

Konsep legitimasi sebenarnya berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat atau tidak?. Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Artinya legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Pengertian legitimasi atau keabsahan seperti yang dikumpulkan oleh **Miriam Budiardjo** dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati.
2. Legitimasi adalah *the conviction on the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime* (David Easton, *System Analysis of Political Life*, 1965).



3. Legitimasi mencakup *the capacity to produce and maintain a belief, that the existing political institutions or forms are the most appropriate for the society* (Seymour Martin Lipset, *Political Man : The Social Basis of Politics*, 1969)¹⁶.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa Legitimasi sangat terkait erat dengan keyakinan moral yang membenarkan hak untuk dimanfaatkan menuntut ketaatan dan memberi perintah, legitimasi diperoleh bukan dari penguasa (dari atas - kebawah), melainkan dari masyarakat (dari bawah - keatas). Sebagai contoh, dimata masyarakat Tibet, Dalai Lama diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin politik mereka, sekaligus sebagai pendeta tertinggi. Dengan demikian legitimasi menunjukkan berbagai segmen masyarakat luas untuk meyakini bahwa penguasa memiliki hak untuk berkuasa. Penerimaan keabsahan oleh masyarakat tersebut, juga dapat menghindarkan penguasa dari mengandalkan kekerasan fisik dalam mempertahankan kekuasaannya.

Legitimasi juga memudahkan bagi para penguasa untuk membuat berbagai kebijakan dalam situasi yang sulit. Banyak penguasa yang sulit atau cenderung mengelak untuk membuat kebijakan, karena khawatir terhadap konsekuensi-konsekuensi bila melakukan kesalahan yang berakibat pada hilangnya legitimasi masyarakat dan runtuhnya kekuasaannya. Kajian tentang legitimasi kekuasaan, khususnya mengenai legitimasi Negara.

¹⁶ Miriam Budiharjo, *Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta, Gramedia, 1994) hal : 90-91

Max Weber dianggap sebagai teoritikus legitimasi. Konsepnya bahwa kekuasaan dilegitimasi dengan mengacu pada adat istiadat dan tradisi, atau klaim-klaim kharismatik pemimpin personal, atau pada prosedur-prosedur rasional- legal, dianggap sebagai sumbangan terbesar Max Weber terhadap sosiologi politik. Sebagaimana di kemukakan oleh **J.Freund**, bahwa ;

Tidak ada otoritas yang puas begitu saja atas ketaatan dan kepatuhan yang hanya muncul berdasarkan common sense, rasa pantas atau penghargaan belaka; kekuasaan akan selalu berusaha menumbuhkan kepercayaan di kalangan pengikutnya untuk meyakini legitimasi yang dia miliki, dan ini ditempuh dengan cara mentransformasikan disiplin-disiplin menjadi sikap tunduk dan patuh terhadap kebenaran yang dia wakili¹⁷.

Tiga bentuk legitimasi yang di kemukakan **Max Weber** yaitu :

1. Legitimasi tradisional, yaitu keyakinan dalam suatu masyarakat tradisional, bahwa pihak yang menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk memerintah, misalnya kaum bangsawan atau keluarga raja (dinasti) oleh karena itu sudah sepatutnya apabila pihak itu ditaati.
2. Legitimasi kharismatik, berdasarkan pada perasaan kagum, hormat, cinta masyarakat terhadap seseorang individu yang sangat

¹⁷ Bryan S. Turner, *Religion and Social Theory*.(London,SAGE publications Ltd. 1991).h.322

mengesankan sehingga masyarakat dengan sendirinya bersedia untuk mentaatinya; misalnya ketaatan masyarakat kepada pemimpin spiritual pada masyarakat primitif, atau ketaatan masyarakat kepada pemimpin agama.

3. Legitimasi Rasional – legal, berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin¹⁸.

Menurut **Jurgen Habermas**, legitimasi atau otoritas dianggap sah jika memenuhi kondisi berikut :

1. Tatanan normatif harus betul-betul kokoh
2. Orang-orang yang berhubungan dengan hukum harus mempercayai legalitas yaitu percaya terhadap kebenaran formal berbagai prosedur untuk menciptakan dan menerapkan hukum¹⁹.

B. KONSEP KEKUASAAN

Dari sudut etimologi, kekuasaan secara sederhana dan umum diartikan sebagai "kemampuan berbuat dan bertindak" (*power is an ability to do or act*)²⁰. Pengertian itu memperlihatkan bahwa kekuasaan adalah suatu kemampuan yang terdapat didalam hubungan antar manusia (sosial) sebagai wadah penerapan kekuasaan. Kekuasaan dapat juga dipahami dari definisi yang dikemukakan oleh **Miriam Budiardjo**, yaitu : *Secara umum dapat*

¹⁸ Franz Magnis, Suseno *Etika politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1987). h.5

¹⁹ Jurgen Habermas, *Krisis Legitimasi*, (Yogyakarta, Qalam, 2004) hal : 280

²⁰ AS. Hornby, *Oxford Advanced Dictionary*, Oxford University Press, Oxford, 1983, hlm. 652

dikatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu²¹. Inilah kesepakatan umum mengenai makna dan definisi kekuasaan. Meskipun demikian, diantara para pemikir politik tetap terdapat sedikit perbedaan titik pandang atau penekanan (*stressing*), terutama dalam hal konteks dimana kekuasaan itu berlaku, atau siapa yang memegang dan menjalankan kekuasaan itu.

Konsep tentang kekuasaan politik merujuk kepada kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik ini merupakan sebagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada kelembagaan sebagai pihak yang berhak mengendalikan tingkah laku masyarakat. Oleh karenanya, cakupan kekuasaan politik tidak hanya meliputi ketaatan dari masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas di bidang administratif, legislatif dan yudikatif²².

²¹ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Gramedia, 1993) hal : 35

²² Miriam Budiardjo, *ibid*, hal : 37

Secara lebih lengkap, beberapa pengertian lain dari kekuasaan yang diungkapkan para ahli politik, sebagaimana diinventarisir oleh **Miriam Budiardjo** antara lain sebagai berikut :

1. Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemauan ini (Max Weber, *Wirtschaft und Gessellschaft*, 1992).
2. Kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau suatu kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama (van Doorn, *Sociologische Begrippen en Problemen rond het Verschijnsel Macht*, 1957).
3. Kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagian) alternatif-alternatif bertindak atau memilih, yang tersedia bagi pelaku-pelaku lain (Mokken, *Power and Influence as Political Phenomena*, 1976).
4. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menyebabkan kesatuan-kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif melaksanakan kewajiban-kewajiban yang mengikat. Kewajiban dianggap sah sejauh menyangkut tujuan-tujuan kolektif, dan jika ada perlawanan, maka pemaksaan melalui sanksi-sanksi negatif dianggap wajar – terlepas

dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu (Talcott Parsons, *The Distribution of Power in America Society*, 1957).

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, kiranya dapat diketahui beberapa hal esensial tentang kekuasaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain.
2. Terdapat di dalam suatu interaksi sosial.
3. Mencakup seluruh hubungan dan proses yang terdapat pada interaksi sosial.
4. Mengandung aspek paksaan (memaksa).
5. Mempunyai maksud dan tujuan penyelenggaraan.

Adapun cara-cara memperoleh kekuasaan, seperti dikemukakan oleh **Inu Kencana Syafie**, terdiri dari 7 (tujuh) macam cara.

1. *Legitimate power* adalah perolehan kekuasaan melalui pengangkatan dan atau pemilihan.
2. *Coersive Power* adalah perolehan kekuasaan melalui cara kekerasan, bahkan mungkin bersifat perebutan kekuasaan yang bersifat inkonstitusional.
3. *Expert power* adalah perolehan kekuasaan melalui keahlian seseorang dalam memangku jabatan tertentu.
4. *Reward power* adalah perolehan kekuasaan melalui suatu pemberian, dimana orang atau kelompok yang taat kepada orang atau kelompok

lain mengharapkan atau termotivasi oleh sejumlah uang pembayaran (misalnya gaji).

5. *Reverent power* adalah perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang, baik aspek wajah, postur tubuh, penampilan atau sikap seseorang.
6. *Information power* adalah perolehan kekuasaan melalui penguasaan terhadap akses informasi, terutama dalam era teknologi komunikasi yang sangat modern seperti sekarang.
7. *Connection power* adalah cara memperoleh kekuasaan melalui hubungan (*relation*) yang luas, baik dalam bidang politik maupun perekonomian²³.

C. KONSEP KEPEMIMPINAN

Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar "pimpin" (*lead*) berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu di dalam terdapat dua pihak yaitu yang dipimpin (rakyat) dan yang memimpin (imam). Setelah ditambah awalan "pe" menjadi "pemimpin" (*leader*) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dan setelah ditambah akhiran "an" menjadi "pimpinan" artinya orang yang mengepalai. Apabila dilengkapi dengan awalan "ke" menjadi "kepemimpinan" (*leadership*) berarti kemampuan

²³ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung, Mandar Maju) hal : 54-58

dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Menurut **Henry Pratt Child** dalam **Kartono**, bahwa pemimpin :

"Dalam pengertian luas pemimpin adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau oposisi. Sedangkan dalam pengertian yang terbatas, pemimpin adalah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptansi/penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya²⁴."

Sedangkan menurut **Drs. Moekijat** dalam **Permadi** bahwa seorang pemimpin adalah:

"Seorang yang berhasil menimbulkan perasaan ikut serta, perasaan ikut bertanggung jawab kepada orang-orang bawahannya, dan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan dibawah pimpinannya²⁵."

²⁴ Henry Pratt Fairchild sebagai mana dikutip Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1992) hal : 33

²⁵ Drs. Moekijat sebagaimana dikutip Permadi, *Pemimpinan dan Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1996) hal : 5

Dengan demikian kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa kepemimpinan adalah menyangkut sebuah proses sosial yang dalam hal ini pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstrukturkan aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan didalam sebuah kelompok atau organisasi.

Menurut **George R Terry** sebagaimana dikutip oleh **Sutarto**, adalah :

Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerjasama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan pemimpin.²⁶

Defenisi lain mengenai kepemimpinan adalah seperti yang dikemukakan oleh **Soetopo dan Soemantri** yaitu :

"Kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong dan mengajak, menuntun, menggerakkan dan perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruh tersebut, selanjutnya membuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu^{27"}.

²⁶George R Terry sebagaimana dikutip Sutarto, *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, (Yogyakarta, GM University Press, 1995) hal : 17

²⁷ Soetopo dan Soemantri, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta, Bina Aksara, 1984) hal : 01

Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kepemimpinan terdapat beberapa unsur-unsur yaitu.

1. Kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan dan kelompok
2. Kemampuan menggerakkan tingkah laku bawahan atau orang lain
3. Untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut **Siagian** dalam menjalankan kepemimpinan diperlukan lima fungsi kepemimpinan bagi seorang pemimpin demi tercapainya tujuan organisasi kelima fungsi tersebut adalah :

1. Sebagai penentu arah

Fungsi pimpinan yang teramat penting adalah mempertajam arah dari sasaran dan tujuan organisasi melalui strategi, taktik dan keputusan yang dirumuskan organisasi agar dapat bergerak pada arah yang benar.

2. Sebagai wakil atau juru bicara

Fungsi ini dilakukan dalam menyampaikan informasi ke luar organisasi. Sebagai juru bicara secara formal seorang pemimpin mewakili ata bertindak atas nama organisasinya. Kebijakan, visi dan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi perlu dijelaskan oleh pihak luar dengan maksud agar pihak tersebut mempunyai pengertian yang tepat tentang kehidupan organisasi bersangkutan. Pengertian yang tepat diharapkan bermuara pada pemahaman dan pemberian dukungan yang diperlukan.

3. Sebagai Integrator

Dalam suatu organisasi terkadang timbul adanya sikap yang mementingkan kelompok tertentu dalam bekerja. Mereka tidak memahami bahwa keberhasilan satu kelompok yang bekerja sendirian belum menjamin keberhasilan organisasi sebagai keseluruhan meskipun mereka memiliki tekad dan kemauan keras untuk berbuat seoptimal mungkin. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pimpinan organisasi berfungsi untuk mengintegrasikan atau memadukan semua anggota kelompok dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Sebab kesuksesan pemimpin itu tidak hanya diukur dari keberhasilannya dalam menggerakkan individu-individu untuk berbuat saja, akan tetapi terutama sekali pada kemampuannya untuk menggerakkan kelompok sebagai totalitas.

4. Sebagai Komunikator Efektif

Suksesnya pelaksanaan tugas pemimpin itu sebagian besar ditentukan oleh kemahirannya menjalin komunikasi yang tepat dengan semua pihak yang ada kaitannya dengan kegiatan organisasi tersebut dalam menjabarkan kebijakan dan ide-ide kedalam pengertian praktis sehingga bisa dipahami dan dapat dilaksanakan oleh para bawahannya. Berbagai keputusan yang telah diambil disampaikan kepada para pelaksana melalui jalur komunikasi yang terdapat dalam organisasi tersebut.

5. Sebagai mediator

Fungsi pemimpin disini dimaksudkan dalam penyelesaian konflik yang dapat terjadi dalam suatu organisasi. Konflik-konflik yang muncul, harus diatasi secara cepat dan tepat melalui kemampuan seorang pemimpin selaku mediator yang rasional, objektif dan netral dalam menengahi pertentangan dan konflik-konflik yang muncul²⁸.

Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan tersebut diperlukan 3 aspek penting yaitu kekuasaan, kewibawaan dan kemampuan.

1. Kekuasaan

Kekuasaan adalah otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. **French dan Raven** dalam **Gary Yukl** mengemukakan lima sumber kekuasaan yang diidentifikasi sebagai alat untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain, yaitu:

- a) Kekuasaan paksaan (*coercive power*). Kekuasaan ini didasarkan atas rasa takut. Seseorang pemimpin mempunyai kekuasaan paksa yang tinggi akan mendapat kepatuhan dari anggotanya, karena jika ia tidak mematuhi, berarti akan menerima teguran, penugasan yang tidak menyenangkan atau pemecatan.

²⁸ Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1996) hal : 67

- b) Kekuasaan legitimasi (*Legitimate power*). Kekuasaan ini bersumber pada jabatan yang dipegang oleh pemimpin. Secara normal, semakin tinggi posisi seorang pemimpin, maka semakin besar kekuasaan legitimasinya.
- c) Kekuasaan keahlian (*Expert Power*). Kekuasaan ini bersumber dari keahlian, kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang pemimpin yang diwujudkan lewat rasa hormat dan pengaruhnya terhadap orang lain.
- d) Kekuasaan penghargaan (*Reward power*). Kekuasaan ini bersumber atas kemampuan untuk menyediakan penghargaan, imbalan atau hadiah bagi orang lain. Seorang pemimpin yang mempunyai potensi untuk melakukan penghargaan ini, maka ia berkuasa atas bawahannya.
- e) Kekuasaan daya tarik (*Referent Power*). Kekuasaan ini bersumber dari sifat-sifat pribadi seorang pemimpin. Pemimpin yang selalu tampil dengan kepribadiannya yang jujur, satu kata dengan perbuatan, loyal pada undang-undang Negara atau mementingkan kehidupan orang banyak²⁹.

²⁹ French dan Raven sebagaimana dikutip Garry Yukl, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, (Jakarta, PT. Perhalindo, 1998) hal : 166

2. Kewibawaan

Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur, membawa, memimpin dan memerintah orang lain sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang pemimpin harus dapat menjaga kewibawaannya. Untuk berwibawa, ia harus memiliki kelebihan-kelebihan tertentu bila dibanding dengan kualitas-kualitas yang dipimpinnya, diantara kelebihan-kelebihan itu adalah :

- a) Memiliki energi jasmaniah, mental yang tinggi, serta memiliki keuletan.
- b) Memiliki integritas kepribadian, dewasa, bertanggung jawab dan susila.
- c) Rela bekerja atas dasar pengabdian dan prinsip kebaikan, serta loyal terhadap kelompoknya.
- d) Memiliki intelegensi tinggi untuk menanggapi situasi dan kondisi dengan cermat, memiliki kemampuan persuasi, dan mampu memberikan motivasi yang baik kepada bawahan.
- e) Mampu menilai dan membedakan aspek yang positif, agar mendapatkan cara yang paling efisien untuk bertindak.

3. Kemampuan

Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

John D. Millet dalam **S.Pamudji** mengemukakan bahwa ada empat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar dapat membina organisasi yang dipimpinnya dan mampu memberikan tanggapan atas kritik-kritik, pengarahan-pengarahan dan control yang datang dari luar :

- a) Kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan.

Pemimpin harus menjadi simbol kesatuan gerak dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Disamping itu, ia harus mampu mempersatukan semua potensi dalam menanggapi semua masalah, betapapun kecilnya, harus mempertimbangkan efeknya dalam keseluruhan usaha mencapai tujuan umum organisasi.

- b) Kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan

Pemimpin harus mampu dengan tangkas, cerdas, dan arif bijaksana dalam mengambil keputusan yang tepat, serta ditunjang oleh pengetahuan yang luas, pengalaman yang panjang, serta informasi yang cukup dalam rangka memecahkan masalah-masalah dalam organisasinya.



c) Kemampuan untuk melimpahkan wewenang.

Melihat banyaknya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mendelegasikan wewenangnya. Dalam pelaksanaan delegasi, perlu ada komunikasi dan saling tukar pikiran antara pemimpin dengan orang yang diserahi delegasi mengenai tugas apa yang didelegasikan, dimana garis batas-batasnya, berapa lama jangka waktu pengerjaannya dan bagaimana cara pengerjaannya.

d) Kemampuan untuk menanamkan kesetiaan atau loyalitas.

Agar dapat menanamkan loyalitas kepada para bawahan, maka kepemimpinan harus menciptakan lingkungan kerja yang baik, kejelasan tentang tugas-tugas pekerjaan, hasil-hasil konkrit yang ingin dicapai, serta kesedian berpartisipasi. Untuk membina kemauan berpartisipasi para bawahan, pemimpin harus banyak mencurahkan perhatian kepada mereka dengan jalan melakukan konsultasi dengan mereka, melakukan inspeksi ditempat-tempat kerja, bersimpati dengan persoalan-persoalan pribadi mereka, memberikan penghargaan sesuai dengan prestasi masing-masing.³⁰

³⁰ John D Millet sebagaimana dikutip S.Pamudji, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta, Bina Aksara, 1982) hal : 80

Tipologi kepemimpinan adalah cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Sehingga digunakan oleh pemimpin sebagai pedoman dalam mendorong bawahannya untuk mau bekerja. Tipologi kepemimpinan ada berbagai macam.

Menurut **Kartono**, Tipe kepemimpinan adalah :

1. Tipe Kharismatik

Rupanya sulit untuk menemukan sebab seorang pemimpin mempunyai kharisma. Yang jelas adalah bahwa pemimpin tersebut mempunyai daya tarik sendiri. Pemimpin yang kharismatik mampu menguasai bawahannya karena mereka diliputi oleh kepercayaan yang luar biasa terhadapnya. Para pengikut seorang pemimpin yang kharismatik tidak pernah mempersoalkan nilai yang diikuti, sikap, gaya dan perilaku yang digunakan pemimpin diikutinya. Keputusan dan kesetiaan para bawahannya timbul dari kepercayaan yang penuh kepada pemimpin yang dicintai, dihormati, dan dikagumi, bukan karena benar tidaknya alasan-alasan dan tindakan seorang pemimpin. Kemampuan untuk menguasai bawahannya yang terdapat pada diri seorang pemimpin yang kharismatik disebabkan kepercayaannya yang luar biasa kepada kemampuannya itu. Seorang pemimpin yang kharismatik adalah pemimpin yang dianggap mempunyai kekuatan ghaib atau kesaktian yang tidak dapat diindra secara ilmiah, sehingga

dikagumi para bawahannya meskipun para bawahannya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang tersebut dikagumi.

2. Tipe Paternalistis

Tipe pemimpin ini menganggap bahwa bawahan sebagai manusia yang belum dewasa sehingga pemimpin bersikap selalu melindungi atau jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk berkreasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya inisiatif.

3. Tipe Militeristis

Pemimpin yang militeristis adalah seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinannya dalam menggerakkan bawahannya dengan menggunakan sistem perintah dan sering bergantung pada pangkat dan jabatannya.

Cirri-ciri pemimpin pada tipe militeristis antara lain :

- a) Menggunakan sistem perintah.
- b) Menghendaki kepatuhan yang penuh
- c) Menyenangi formalitas dan upacara
- d) Adanya disiplin keras dan kaku
- e) Tidak menghendaki saran dan kritik
- f) Komunikasi hanya satu arah saja

4. Tipe Otokratis

Tipe ini menganggap organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, berdasarkan pada kekuasaan dan paksaan yang harus selalu dipatuhi, pemimpinnya berperan sebagai pemain tunggal.

5. Tipe Laissez Faire

Pada tipe ini pemimpin praktis tidak memimpin dan membiarkan kelompoknya untuk berbuat semauanya sendiri. Pemimpin pada tipe ini tidak berpartisipasi sedikitpun dalam kegiatan kelompoknya dan dia hanya merupakan pemimpin simbol.

6. Tipe Populistic

Tipe pemimpin ini adalah kepemimpinan yang dapat membangun solidaritas rakyat. Kepemimpinan seperti ini mengutamakan kembali penghidupan nasionalismenya.

7. Tipe Administratif

Kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan administrasi yang efektif. Sedangkan para pemimpinnya terdiri dari pribadi yang mempunyai dinamika modernisasi pembangunan.

8. Tipe Demokratis

Tipe demokratis adalah memberikan bimbingan yang efisien kepada pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahannya,

dengan penekanan rasa tanggung jawab pada diri sendiri serta kerjasam yang baik³¹.

D. KONSEP KELEMBAGAAN

Kelembagaan merupakan satu konsep yang tergolong membingungkan, dan dapat dikatakan belum memperoleh pengertian yang mantap dalam ilmu sosiologi. Dalam banyak literatur teoritis, baik berbahasa Inggris maupun Indonesia, istilah "kelembagaan" (*social institution*) selalu disilangkan dengan "organisasi" (*social organization*). Kedua kata ini sering sekali menimbulkan perdebatan di antara para ahli. "belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris '*social institution*', Ada yang menterjemahkannya dengan istilah 'pranata', ada pula yang 'bangunan sosial'³².

Meskipun belum sepakat, namun dapat diyakini bahwa kelembagaan adalah *social form* ibarat organ-organ dalam tubuh manusia yang hidup dalam masyarakat. Kata "kelembagaan" menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap (*established*) yang hidup (*constitued*) di dalam masyarakat. Suatu kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku (*ways*) yang hidup pada suatu kelompok orang. Ia merupakan sesuatu yang stabil, mantap, dan

³¹ Kartono Kartini, Opcit, hal : 69

³² Soemardjan, Selo dan S. Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan)*. (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1964) hal. 61

berpola; berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat; ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern; dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial³³.

Tiap kelembagaan memiliki tujuan tertentu, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki pola perilaku tertentu serta nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati yang sifatnya khas. Kelembagaan adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat. Tiap kelembagaan dibangun untuk satu fungsi tertentu. Karena itu kita mengenal kelembagaan pendidikan, kelembagaan-kelembagaan di bidang ekonomi, agama, dan lainlain. Jadi, dunia berisi kelembagaan-kelembagaan. Semua manusia pasti masuk dalam kelembagaan. Tidak satu, tapi sekaligus dalam banyak kelembagaan, mulai dari di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan lain-lain. Di kalangan agen-agen pembangunan pedesaan dan pertanian, kelembagaan umumnya dipersempit terutama hanya menjadi kelembagaan kelompok tani, koperasi, subak, kelompok petani peserta program, dan kelompok pengrajin. Sebagian besar literatur hanya membanding-banding apa beda "kelembagaan" dengan "organisasi". Setidaknya ada empat bentuk cara membedakan yang terlihat. *Pertama*, kelembagaan cenderung tradisional, sedangkan organisasi cenderung

³³ Koentjaraningrat (1997. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), mengusulkan istilah pranata sebagai padanan kata "institution", dan pranata sosial untuk "social institution".

modern. Perbedaan atas tradisional dan modern ini sejalan dengan perbedaan yang diajukan oleh Horton dan Hunt: "... *institution do not have members, they have followers*"³⁴. Kedua, kelembagaan dari masyarakat itu sendiri dan organisasi datang dari atas. Cara perbedaan ini relatif mirip dengan perbedaan di atas, namun ini tidak dalam konteks tradisional-modern, namun bawah-atas. Pendapat ini digunakan misalnya oleh Tjondronegoro: "... *lembaga semakin mencirikan lapisan bawah dan lemah, dan organisasi mencirikan lapisan tengah dengan orientasi ke atas dan kota*"³⁵. Ketiga, kelembagaan dan organisasi berada dalam satu kontinum, dimana organisasi adalah kelembagaan yang belum melembaga, tujuan akhir adalah organisasi yang melembaga, atau kelembagaan yang memiliki aspek organisasi. Jadi, mereka hanya berbeda dalam tingkat penerimaan di masyarakat saja. Organisasi dipandang hanya sebagai sesuatu yang akan dilembagakan. Keempat, organisasi merupakan bagian dari kelembagaan. Dalam konteks ini, organisasi merupakan organ dalam suatu kelembagaan. Keberadaan organisasi menjadi elemen teknis penting yang menjamin beroperasinya kelembagaan.

³⁴ Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. *Sociology. Sixth Edition.* (McGraww-Hill Book Company; Sidney, Tokyo, 1984) Hal. 211.

³⁵ Tjondronegoro, SMP, *Revolusi Hijau dan Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa.* Dalam: *Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan,* (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta, 1999) Hal. 22.

Secara sederhana, sesuatu *sosial relation* dapat disebut sebagai sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya:

1. *Komponen person*. Orang-orang yang terlibat di dalam satu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
2. *Komponen kepentingan*. Orang-orang tersebut sedang diikat oleh satu kepentingan atau tujuan, sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi. Misalnya, sesama anggota kelompok tani diikat oleh kepentingan yang sama secara horizontal, namun antara seorang petani dengan pedagang gabah diikat oleh kepentingan vertikal. Keduanya sama-sama "dipaksa" untuk berinteraksi.
3. *Komponen aturan dan aturan*. Setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama, sehingga seseorang dapat menduga apa perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
4. *Komponen struktur*. Setiap orang memiliki posisi dan peran, yang harus dijalankannya secara benar. Orang tidak bisa merubah-rubah posisinya dengan kemauan sendiri.

Dalam implementasi otonomi daerah, idealnya lembaga adat dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Peranan di sini dimaksudkan adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan Lembaga Adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan.

Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan.

Adapun tugas lembaga adat, berikut ini penulis kutip rumusan dari **PERMENDAGRI No.3 Tahun 1997** sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
2. Memberdayakan, melestarikan, dan mengem-bangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

1. Mewakili masyarakat adat ke luar, yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.
2. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik.
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Lembaga adat berkewajiban diantaranya__memelihara stabilitas nasional dan daerah dan menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menjalankan tugas-tugas, hak, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan masyarakat. Identitas adat istiadat.

Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus jelas.

Identifikasi itu meliputi:

1. Nama dan/atau istilah yang digunakan
2. Struktur, sistem status adat atau jabatan adat.
3. Struktur wilayah adat.
4. Kegiatan masyarakat adat yang berpola.
5. Pranata serta perangkat norma-norma adat tennasuk di dalamnya hak-hak dan kewajiban masyarakat adat serta anggota masyarakat adat.
6. Sistem sanksi hukum adat.
7. Kekayaan serta hak milik masyarakat adat dan atau keompok adat.
8. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan adat istiadat.

Sedangkan Tugas dan fungsi lembaga adat menurut adalah :

1. Mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat.
2. Menyelesaikan urusan adat istiadat.
3. Membantu pemerintah desa sepanjang menyangkut adat istiadat.

Tugas dan fungsi lembaga adat tersebut meliputi :

1. Membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya budaya daerah dan memberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan.
2. Mienampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat.

3. Mencatat adat istiadat masyarakat yang masih hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa yang bersangkutan.
4. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat.
5. Menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan dalam masyarakat
6. Melaksanakan kerjasama antar lembaga adat.

E. KONSEP MASYARAKAT ADAT

Menurut **Koentjaningrat**, masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan yang berinteraksi menurut sistem adat-istiadat, serta terikat oleh suatu rasa identitas komunitas³⁶. Definisi adat menurut **Koentjaningrat** adalah tiap masyarakat baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sebuah nilai budaya yang satu dengan yang lain berkaitan hingga merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan masyarakat³⁷. Menurut **Sondang P. Siagian**, bahwa adat istiadat merupakan bagian penting dari budaya masyarakat yang bersangkutan karena dianggap dapat memelihara stabilitas sosial. Melalui adat maka masyarakat dapat dipersatukan menjadi satu kesatuan yang bulat dengan jalan bermusyawarah dan bermufakat untuk

³⁶ Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1972) hal : 148

³⁷ Koentjaningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta, PT. Jambatan, 1974) hal : 192-193

merembukkan dan merundingkan segala sesuatu tentang adat. Misalnya merapatkan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat tentang pesta-pesta adat, maupun tentang pembangunan sebagai wujud partisipasi sosial masyarakat dalam urusan pemerintahan. Dan lebih khusus pada partisipasi pembangunan yang bersifat sosial budaya.³⁸ Sedangkan pengertian lain adat istiadat adalah nilai atau norma, kaidah atau keyakinan masyarakat desa/marga ataupun satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma yang masih dihayati dan dipelihara.

Sedangkan definisi dari masyarakat adat. Dari aturan yang disebutkan oleh UU No 41 tentang Kehutanan, Pakar Hukum Adat Ter Har, Kementrian Agraria, Konvensi ILO dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat), ada lima hal yang disebutkan harus dipenuhi [*walaupun pada kenyataannya semua aturan hanya menyebutkan empat dari maksimal lima*] sehingga memenuhi syarat bagi suatu masyarakat hukum adat, yaitu dalam hal

1. komunitas: adanya sekelompok orang yang membentuk masyarakat.
2. ada wilayah lokasi keberadaan komunitas itu berada.
3. ada aturan atau hukum yang jelas,
4. ada kondisi kultural, budaya, atau ekonomi yang khas sehingga berbeda dengan masyarakat lainnya.
5. Berasal dari satu keturunan yang sama

³⁸ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005) hal : 33

Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Kehutanan memberikan kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*).
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati.
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut ahli hukum adat **Ter Haar**, masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang memiliki kesamaan wilayah (teritorial), keturunan (geneologis) serta wilayah dan keturunan (teritorial-geneologis), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain³⁹.

Pasal 1 poin 3 Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN no. 5 Tahun 1999 masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau pun atas dasar keturunan.

³⁹ Ter Harr, Masalah-masalah hukum adat, www.juridika.com diakses 10 Januari 2009

Konvensi ILO 169, 1989, masyarakat adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut dan statusnya diatur, baik seluruh maupun sebahagian oleh masyarakat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara memberikan defenisi Masyarakat adat sebagai "komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas"⁴⁰.

⁴⁰ Journal World Agroforestry Centre (ICRAF)., Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)., Forest Peoples Programme (FPP), *Satu Yang Kami Tuntut Pengakuan*, 2003. Online (<http://www.gpsa.or.id>), diakses 10 Juli 2008

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kabupaten Bulukumba terletak dibagian selatan Jazirah Sulawesi selatan yaitu sebelah selatan timur dari ibukota provinsi Sulawesi Selatan atau Kota Makassar. Jarak dari ibukota provinsi sekutar 150 km dengan berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah utara dengan Kabupaten Sinjai
2. Sebelah Barat dengan Kabupaten Bantaeng
3. Sebelah selatan dengan Laut Flores
4. Sebelah timur dengan teluk Bone

Kabupaten Bulukumba terdiri dari dua sisi yaitu sisi sebelah selatan mempunyai batas alam berupa laut sebelah timur berupa teluk dengan luas wilayah $\pm 1.154.67$ km² yang terbagi atas 12 kecamatan.

Keadaan alam Kabupaten Bulukumba cukup menarik dimana pada bagian selatan terdapat dataran rendah sedang bagian utara dan timur terdapat dataran tinggi. Pada bagian selatan yang berdataran rendah sangat potensil sekali untuk menyumbangkan produksi tanaman pangan, seperti padi dan agak ke timur dengan jagung, disamping itu di bagian utara yang berdataran tinggidan berhawa sejuk banyak dimanfaatkan untuk



pengembangan tanaman ekspor seperti karet, cengkeh, kopi, kelapa dan sebagainya.

Bervariasinya vegetasi ini disebabkan oleh keadaan tanah Bulukumba seperti di bagian timur tanahnya kapur karang, dan bagian pesisir bertanah sedimen sedangkan bagian barat yang berhubungan dengan pegunungan Lompobattang tanahnya berupa vulkanik, melihat keadaan alam yang demikian serta pengaruh daerah pantai dari dua sisi, maka dapat dipastikan pada umumnya penduduk Bulukumba hidupnya dari pertanian dan nelayan. Kabupaten Bulukumba yang luasnya ± 154.67 Km² dihuni oleh penduduk ± 400.000 jiwa yang mendiami 10 kecamatan masing-masing :

1. Kecamatan Gantarang
2. Kecamatan kindang
3. Kecamatan Ujung Bulu
4. Kecamatan Ujung Loe
5. Kecamatan Bonto Bahari
6. Kecamatan Bonto Tiro
7. Kecamatan Herlang
8. Kecamatan Kajang
9. Kecamatan Bulukumpa
10. Kecamatan Rilau Ale

Selanjutnya pada penulisan ini akan dibahas khusus Kecamatan Kajang yang mana didiami oleh mayoritas Masyarakat Ammatowa yang lebih khusus lagi ialah Desa Tana Toa yang terletak pada arah sebelah barat daya Ibu kota Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Desa Tana Toa mempunyai luas sekitar 3.728.50 Ha dengan perincian sebagai berikut ; Hutan 97,50 Ha, ladang 2018,62 Ha, sawah 585 Ha, kebun campuran 659 Ha, kelapa hibrida 121,43 Ha, tanah kuburan 22,50 Ha, Jalan desa 90,50 Ha, dan 180 merupakan wilayah pekarangan rumah.

Desa Tana Toa terbagi atas sebelas dusun yang terdiri dari lima dusun diantaranya merupakan wilayah masyarakat Ammatowa sedangkan tujuh dusun selebihnya hanya sebagian kecil dari masing-masing dusun tersebut yang merupakan tempat tinggal masyarakat Ammatowa ini ditandai dengan empat sungai kecil yang dijadikan batas wilayahnya, walaupun posisi masing-masing dari sungai tersebut tidak bersinggungan.

Batas-batasnya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tambangan Kecamatan Kajang
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Possi Tana dan Desa Lembanna Kecamatan Kajang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Bulukumpa

Iklim di desa Tana Toa tidak banyak merasakan musim kering karena daerah tersebut bergunung-gunung dan berlautan, pulau-pulau yang ada di wilayah desa Tana Toa sebagian besar dikuasai oleh masyarakat Ammatoa dan sampai sekarang masih dipelihara kelestariannya. Dari wilayah hutan inilah mengalir sungai-sungai kecil yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah sekitarnya.

Masyarakat Ammatoa pada prinsipnya masih memandang hutan itu sebagai sesuatu yang keramat dan tidak boleh dirusak kelestariannya, karena disanalah tempat naik turunnya manusia kebumi yang terletak pada hutan-hutan di wilayah tersebut.

B. Mata Pencarian

Mata pencarian pokok masyarakat Ammatoa, pada umumnya adalah bertani. Hanya sebagian kecil lainnya yang bergerak dalam bidang perdagangan. Sawah dan lading yang mereka tekuni sejak dari turun temurun sampai sekarang, mereka tidak menerima system pertanian secara modern, tidak menerima berbagai macam fasilitas, tidak menerima traktor dan lain-lain. Mereka masih berpegang teguh kepada system pertanian secara tradisional.

Mata pencarian tambahan ialah menenum kain sarung (tope le'leng) dan mengayam daun pandang menjadi tikar atau peralatan lainnya yang banya dilakukan oleh kaum wanita.

C. Pendidikan

Pada umumnya masyarakat Ammatoa tidak mampu berbahasa nasional terutama bagi orang-orang tua mereka. Salah satu faktor dari banyaknya jumlah buta aksara dikawasan adat tersebut adalah adanya nilai-nilai leluhur mereka, bahwa pasang ri Kajang, sama dengan pendidikan formal disekolah-sekolah. Bahkan menurut mereka *Pasang ri Kajang* lebih hakiki sifatnya dalam memberikan tuntunan kehidupan didunia dan khususnya tuntunan menuju kehidupan akhirat yang abadi, karena isi dan fatwanya tidak bias dengan kehidupan keduanian yang penuh materi.

Didalam kawasan Adat kajang didesa Tana Toa terdapat empat unit SD. Pada umumnya anak-anak msyarakat adat Kajang mulai memasuki bangku sekolah dasar setelah berumur 7-8 tahun. Mereka selama kurang lebih 3 tahun sebelumnya harus membantu orang tua mereka sebagai angkatan kerja dalam mengembala kerbau dan sapi. Sedangkan pada umur 10-15 tahun mereka diharapkan untuk menuntut pendidikan informal dengan lebih memperdalam ajaran leluhur *Pasang ri Kajang*, baik melalui lingkungan keluarganya sendiri maupaun melalui pemangku-pemangku adat.

D. Latar Belakang Sejarah

Masyarakat ammatoa percaya bahwa manusia sebelum menjadi manusia ia berada ditempat yang gelap. Untuk senantiasa mengingat tempat tersebut maka sesudah berpindah tempat (setelah lahir kedunia) mereka menggunakan warna hitam dalam hidupnya (yang merupakan simbol)

Manusia pertama di kajang adalah diturunkan dari kayangan atas kehendak Turie' a'ra'na (Tuhan) dan itulah yang disebut Tomanurung dan menjadi Ammatoa yang pertama (Ammatoa Mariolo). Mitos mengenai manusia pertama ada beberapa versi sebagai berikut:

1. Mitos Pertama yaitu Turie' A'ra'na (Tuhan) memerintahkan kepada Batara Guru untuk melihat keadaan /situasi bumi, setelah kembali : melaporkan bahwa perlu ada manusia diatas bumi untuk meramaikan bumi . Atas kehendak Turie' A'ra'na maka diturunkanlah Tomanurun ke bumi dengan mengendarai seekor burung yang berkepala dua yang disebut Koajang, inilah yang mengawali asal muelanya nama kajang.
2. Versi kedua menceritakan bahwa manusia pertama/Tomanurung diturunkan kebumi ialah Batara Guru, perkawinan Batara Guru dengan salah seorang puteri dari kerajaan pertiwi lahirlah tiga orang yakni Batara Luwu, Sawerigading dan Jabeng.

3. Versi lain menceritakan bahwa sepasang suami isteri, masing-masing bernama Tamparang Daeng Maloang (Malodo Putta Parang) dan Puabinanga muncul disebuah tempat bernama "Tombolo" sebagai manusia pertama di dunia ini, pasangan ini tidak mempunyai anak. Beberapa pagi berturut-turut setiap sang isteri akan mengambil air ditempayan, dilihatnya tempayan itu selalu kosong, pada hal sebelum tidur malam, tempayan itu diisi penuh. Kejadian itu dilaporkan kepada suaminya, esok pagi sang suami mengadakan penyelidikan dengan jalan mengintip, dilihatnya seorang gadis cantik sedang mandi didekat tempayan, lalu gadis tersebut ditangkap dan dikawininya, maka lahirlah tiga orang anak (putera) yang kelak diangkat menjadi Raja Kajang, Laikang dan Lembangan. Sang gadis itulah yang dipandang sebagai "Tomanurung" yang diberi nama Daeng Ri Langi.

Sejak masuknya agama islam di lokasi ini, masyarakat Ammatoa dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Rilalang Embaya atau Tanah Kamase-masea (Kajang Dalam) dan
2. Ipantarang Embaya atau Tanah Kuasaiya (Kajang Luar)

Perbedaan terletak pada letak lingkungan pemukiman. Pada kelompok Rilalang Embaya menempati daerah pemukiman yang dianggap suci oleh masyarakat Ammatoa. Sedangkan kelompok kedua Ipantarang Embaya berada diluar Wilayah Rilalang Embaya. Kedua Pemukiman ini dibatasi dua

buah sungai. Keduanya juga disebut Tuli Ilau dan Tuli Iraja. Dilingkungan Ipantarang Embaya Penerapan Pasang dan Kasipalli (Pantangan) tidak seketat pelaksanaan dilingkungan Rilalang Embaya. Dalam perkembangan masyarakat, kedua kelompok ini semakin mengalami perbedaan. Dilingkungan Rilalang Embaya, masyarakat tetap patuh pada Pasang Ri Kajang dan sama sekali menolak segala yang berasal dari luar, sementara kelompok Ipantarang Embaya secara terbuka menerima perubahan. Karena terbuka dari luar, kelompok ini mengalami kemajuan-kemajuan yang menyolok dibanding kelompok yang tinggal dalam wilayah pertama.

Pemisahan kedua kelompok ini, membawa akibat logis dalam perubahan masyarakat. Kelompok Ri Lalang Embaya dianggap penganut Pasang Ri Kajang yang tetap utuh dan tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan dari luar. Penduduknya menggunakan simbol-simbol tradisional, seperti bentuk bangunan rumah dibuat dari rumah panggung dengan pintu depan dipertengahan dinding berbeda dengan pintu depan rumah-rumah Bugis Makassar yang berada disudut sebelah kanan rumah. Kemudian rumah-rumah tradisional Rilalang Embaya tidak mempunyai ruang tamu yang terpisah dari kamar-kamar lain. Pada umumnya diruang depan, selain berfungsi sebagai ruang tamu juga sekaligus ruang dapur persis berada diluar pintu, semakin kedalam ruang itu dimaksudkan tempat keluarga.

Simbol-simbol lainnya yang masih digunakan setiap penghuni Rilalang Embaya ialah menggunakan pakaian berwarna hitam. Warna hitam menurut keterangan Ammatoa (Puto Cacong) adalah pilihan orang Kajang sejak dahulu. Ketika warna-warna sebagai simbol identifikasi etnis Kerajaan Luwu, Bone dan Kajang, orang Luwu memilih warna hijau, putih dan kuning. Orang Gowa memilih warna merah hitam. Kami di Kajang memilih warna hitam. Warna hitam adalah lambing kesederhanaan, kesucian dan kesabaran.

E. Agama dan Kepercayaan

Secara formal penduduk kecamatan Kajang hanya menganut satu agama, seperti tercatat di kantor departemen agama Kabupaten Bulukumba. Namun dari segi amalan-amalan dan perbuatan ritual mereka dapat dibedakan atas penduduk yang mengaku beragama Islam dan menjalankan ajaran-ajarannya, dan penduduk yang hanya mengaku secara formal saja. Bahkan penduduk yang hanya mengaku secara formal saja tidak sedikit melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan tuntunan Islam. Yang dimaksudkan adalah ajaran-ajaran yang bersumber dari pasang, biasa disebut kepercayaan *Patuntung*. Kata *Patuntung* dialek konjo, berasal dari kata "*Tuntung*" yang mendapat awalan *Pa*. Awalan *Pa* dalam kata "*Patuntung*" penggunaannya sama dengan awalan "*pe*" dalam bahasa Indonesia. Kata "*Patuntung*" dapat mempunyai beberapa pengertian :

1. Tuntung berarti "Tuntut" atau "Belajar", *Patuntung* berarti "Penuntut" atau "Pelajar". Maksudnya seorang yang mempelajari sesuatu *Pannngissengan* (Ilmu Pengetahuan) yang bersumber dari Pasang ri Kajang.
2. Tuntung berarti puncak atau ujung (ketinggian) yang dimaksudkan bahwa seorang yang sedang berusaha untuk mencapai puncak atau ujung dari sesuatu.
3. Tuntung berarti "cari" Patuntung dalam arti Pencari, maksudnya seorang yang mencari sesuatu dengan mempunyai kemauan keras dengan tekad bulat, karena didorong oleh sesuatu keyakinan untuk mendapatkan sesuatu yang dicari.

Dari beberapa pengertian kata "Tuntung" dapatlah disimpulkan bahwa seorang pelajar yang mencari ilmu sampai kepuncak (hakekat ilmu). Yang melaksanakan ajaran *Patuntung* adalah masyarakat yang berdiam di wilayah Kajang Dalam (Masyarakat Ammatoa). Lingkungan yang sepenuhnya diberlakukan ketentuan-ketentuan adat dan harus berpaikan serba hitam. Patuntung oleh penganutnya tidak diakui sebagai agama bahkan mereka mengaku beragama Islam walaupun mereka tidak melakukan syariat Islam seperti yang digariskan dalam ajaran-ajaran Islam⁴¹.

⁴¹ Op Cit, Siti Aminah

BAB IV PEMBAHASAN

A. LEGITIMASI KEPEMIMPINAN

Menurut Ammatoa bahwa dimasa lalu wilayah kekuasaan Ammatoa sangatlah luas, hal tersebut didasarkan pada *pasang*⁴¹ yang telah diwariskan secara turun temurun. Adapun bunyi *pasang* sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ammatoa sendiri (wawancara, 17 Januari 2009) adalah

"Rie' se're hattu nakua mo bohe Amma, seppang-seppangiji tanaya, nagiling appi halimi Turie'A'ra'na (Tuhan) gae tanaya iyamintu Tamatto, Tanuntung, Buatana, sangkala Lombo' " na gae' pole butta appa'a iyamintu Ambong. Ternate, Tambelu, Tambora. Na gae pole butta' angrai a' iyamintu sape' solo, kaili, Salaparang, Nagiling naluara mo tanaya, suarami linoa, tattangmi angkuaya somba ri gowa, mangkau ri Bone, Pajunga ri Luwu, Ammatoa ri Kajang"

Adapun isi *pasang* tersebut artinya : suatu ketika Ammatoa berkata bahwa wilayah kita sempit kemudian perkataannya mendapat jawaban dari Tuhan bahwa perluaslah wilayahmu sampai ke Tamatto, Buatana, Sangkala Lombo⁴². Kemudian perluas lagi ke empat daerah luar yaitu Ambong, Ternate, Tambelu, Tambora⁴³. Kemudian Wilayah Ammatoa kemudian

⁴¹ Pasang adalah hukum tak tertulis yang diwariskan secara turun temurun mulai dari Ammatoa pertama sampai sekarang. Fungsi dari pasang ini menurut Ammatoa adalah sebagai hukum yang mengikat masyarakat supaya tetap dalam koridor ketentuan-ketentuan adat.

⁴² Tamatto Tanuntung, Buatana, Sangkala Lombo' adalah wilayah di sekitar wilayah adat yang sekarang terbagi dalam beberapa desa.

⁴³ Ambon dan ternate adalah wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara sedangkan Tambelu dan Tambora adalah wilayah yang saat ini masuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur.

diperluas lagi ke Sape', Solo, Kaili, Salaparang⁴⁴. Kemudian luaslah wilayah kekuasaan dan jelaslah bahwa *somba* di Gowa, *Mangkau* di Bone, *pajunga* di Luwu dan *Ammatoa* di Kajang.

Menurut salah satu informan yaitu Azis Tambi⁴⁵ (wawancara, 19 Januari 2009) bahwa :

"Wilayah yang teramat luas itu terkesan fantastis dan cenderung hanyalah sebagai mitos, kecuali untuk wilayah Tamatto, Tanuntung, Buatana dan Sangkala Lombo' dan seluruh wilayah kecamatan Kajang saat ini adalah wilayah yang realistis masuk dalam kekuasaan Ammatoa di masa lampau".

Untuk saat ini wilayah yang masuk dalam kekuasaan Ammatoa relatif lebih sempit dibanding dengan di masa lampau. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu informan yaitu Abdul Salam⁴⁶ (wawancara 18 Januari 2009) bahwa

"saat ini wilayah Ammatoa hanya mencakup wilayah desa Tana Toa saja sebagai wilayah adat, dan satu dusun yaitu dusun Benteng sebagai wilayah tempat tinggal Ammatoa. Dusun Benteng inilah sebagai kawasan adat yang tetap terjaga keasliannya dari pengaruh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pandangan masyarakat adat Kajang".

⁴⁴ Solo (Jawa Tengah) dan Kaili (Sulawesi Tengah) sedangkan Sape' dan Salaparang menurut ammatoa wilayah itu berada di Kalimantan.

⁴⁵ Aziz Tambi adalah Tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Malleleng. Dia adalah salah seorang kerabat dekat Ammatoa yang memperjuangkan agar Masyarakat adat Kajang di buatkan perda secara khusus oleh Pemkab Bulukumba.

⁴⁶ Abdul Salam adalah Kepala Desa Tana Toa, dan saat ini dalam struktur kelembagaan Ammatoa, dia menjabat sebagai Galla Lombo'.

Wilayah dusun Benteng adalah sebagai tempat tinggal Ammatoa dan sebagai pusat pusat kekuasaan Ammatoa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Menurut Ammatoa (wawancara 17 Januari 2009) "*talakulle'a nakke sulu ri tana kamase-masea punna jari tau amma*" artinya Ammatoa tidak boleh keluar dari kawasan adat. Hal tersebut di maksudkan karena rasa tanggung jawab yang harus diimbang oleh ammatoa sebagai pemimpin tertinggi dan pantang baginya untuk meninggalkan rakyatnya. Totalitas dalam bentuk kerja melayani yang di lakukan Ammatoa kepada rakyatnya secara ikhlas, tidak terlepas dari kuatnya aturan-aturan adat yang dipegang oleh Ammatoa, pemangku-pemangku adat dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam khasanah Ilmu politik modern, pemerintahan dapat terwujud karena memiliki wilayah, rakyat dan hukum yang jelas.. Apabila hal tersebut di kaitkan dalam konteks masyarakat adat Kajang, maka posisi Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat adat Kajang dapat di ibaratkan sebagai pemerintahan dalam bentuk *monarki*⁴⁷, hal itu ditandai dalam struktur kelembagaan, Ammatoa adalah pimpinan pucuk tertinggi dan mempunyai peranan amat luas serta menganggap kekuasaan yang dimilikinya merupakan pemberian Tuhan (*Turi'e A'ra'na*). Dengan fungsi sebagai kepala pemerintahan yang mengurus segala macam keperluan rakyatnya, menjaga

⁴⁷ Menurut Aristoteles, monarki adalah pemimpin tertinggi terletak ditangan satu orang , *mono* artinya satu dan *archein* artinya pemerintah. (dikutip dari buku Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung, Cv.Armico) hal : 184

wilayahnya dan menegakkan hukum secara adil maka Ammatoa mendapatkan legitimasi kepemimpinannya yang kuat di mata masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya.

Legitimasi sangat terkait erat dengan keyakinan moral yang membenarkan hak untuk dimanfaatkan menuntut ketaatan dan memberi perintah, legitimasi diperoleh bukan dari penguasa (dari atas - kebawah), melainkan dari masyarakat (dari bawah - keatas). Oleh sebab itu dalam melihat legitimasi kepemimpinan ammatoa dalam konteks ke-pemerintahan-an harus di dasarkan pada kondisi lokalitas masyarakat setempat. Untuk melihat legitimasi kepemimpinan Ammatoa maka, penulis mendasarkannya pada teori Max Weber sebagai teori yang mampu melihat secara utuh dan menyeluruh dasar-dasar legitimasi yang selama ini di dapatkan oleh Ammatoa selaku pemimpin tertinggi.

1. Legitimasi Tradisional

Legitimasi tradisional yang didapatkan oleh pemimpin tradisional karena mempunyai hubungan darah dengan Ammatoa sebelumnya, Masyarakat tradisional biasanya beranggapan bahwa Keturunan merupakan dasar kewibawaan tradisional. Seseorang yang berasal dari keluarga yang pernah memimpin dianggap memiliki sesuatu sebagai dasar kepemimpinannya.

Menurut Abdul salam (wawancara, 18 Januari 2009) bahwa :

"Hal tersebut juga terjadi dalam masyarakat adat Kajang, pemimpin demikian dianggap telah mewarisi darah kepemimpinan karena kesaktian berhubungan erat dengan keturunan. Kesaktian dapat diwariskan melalui hubungan darah, dan yang bisa menggantikan Ammatoa setelah meninggal adalah keluarga dekat Ammatoa sendiri.

Posisi Ammatoa dan pemangku adat benar-benar ditakuti dan dihormati. Lebih lanjut Abdul salam mengatakan bahwa *masyarakat meyakini bahwa kekuasaan Ammatoa dan pemangku adat mewakili seluruh kekuasaan para leluhur dan Tuhan (Turie' A'ra'na)*, dengan demikian yang berhak menjadi Ammatoa dan pemangku adat adalah dari sanak keluarga yang di pilih secara demokratis dan pemimpin diyakini diberi petunjuk oleh Tuhan (*Turie'A'ra'na*). Namun demikian bukan berarti posisi kekuasaan Ammatoa dan pemangku adat berlaku otoriter dan sewenang-wenang. Ammatoa dan perangkat-perangkatnya adalah bagian dari lembaga adat yang diberi legitimasi oleh masyarakat untuk memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan kesejahteraan masyarakat adat, ini berarti Ammatoa dan lembaga adatnya bertugas mengawasi dan menjamin pelaksanaan adat, karena hanya dengan cara demikian menurut keyakinan, kemurahan dan bantuan arwah para leluhur dapat dipikat dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Ammatoa dianggap sebagai wakil hidup dari para leluhur, karenanya pemenuhan adat harus diawasi.

Menurut Informan Azis Tambi (wawancara, 19 Januari 2009) bahwa :

"Ammatoa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan pada prinsip "tallang sipahua manyu siparampe"⁴⁸ serta menjadi pengayom bagi masyarakatnya. Ammatoa harus berperilaku demikian, karena keabsahaanya sebagai Ammatoa tidak hanya karena faktor keturunan".

Walaupun dalam lingkup kekuasaan dan kepemimpinan Ammatoa pernah mengalami dualisme kepemimpinan tetapi hal tersebut tidak menyebabkan perpecahan politik yang mengakibatkan konflik tanpa ujung atau menyebabkan hilangnya legitimasi dan kesakralan lembaga adat serta posisi terhormat yang didapat oleh Ammatoa. Menurut Azis Tambi (wawancara 19 Januari 2009) bahwa :

"Semua permasalahan tetap dapat dimusyawarahkan untuk diselesaikan dan saat ini konflik tersebut telah dapat diselesaikan oleh lembaga adat dan keharmonisan antara Ammatoa terpilih, yang tidak terpilih dan masyarakat tetap akur seperti sediakala".

Ini menandakan bahwa legitimasi kekuasaan yang didapatkan oleh lembaga adat mampu menjaga keretakan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat sampai pada hal-hal yang sangat kritis, yaitu dualisme kepemimpinan.

Faktor keturunan ini kemudian di perkuat oleh mitos. Keyakinan terhadap mitos masih sangat kuat, karena mitos dapat mempertautkan kehidupan dunia sekarang dengan dunia para leluhurnya. Ada tiga hal yang

⁴⁸ Tallang sipahua manyu siparampe adalah budaya saling tolong menolong dalam kesulitan.

menjadikan masyarakat adat meyakini adanya sesuatu yang bersifat mitos, yaitu: *pertama*, Mitos dapat menyadarkan setiap orang bahwa ada kekuatan-kekuatan supranatural dalam kehidupan yang padanya manusia harus taat dan mengabdikan. *Kedua*, Mitos memberi jaminan harapan bagi setiap generasi. Hal itu nyata, misalnya; dalam wujud tarian adat, nyanyian adat, atau upacara adat, bertalian dengan kesuburan tanah, perkawinan, atau kesuksesan panen, berburu, kesuksesan ditanah perantauan, membangun rumah baru, memberi dasar bagi kerukunan hidup suku, keluarga, dan sebagainya. *Ketiga*, Mitos dapat memberi pengetahuan bagi seseorang tentang asal-usul dan kekuatan-kekuatan yang menguasai dunianya. Yang diwujudkan dalam bentuk cerita tentang kejadian alam yang diwariskan secara turun temurun sebagai hak adat dan hak masyarakat, serta terjadinya kuasa supranatural, seperti leluhur, dengan dewa-dewa, atau Sang Khalik yang membimbing dan mengarahkan kehidupan manusia. Mitos yang menjelaskan tentang asal-usul Masyarakat Kajang memberikan kebanggaan dan keyakinan kuat tentang keunikan dan ciri khas mereka yang patut dijaga kelestariannya. Menurut Ammatoa (wawancara, 17 Januari 2009) ada beberapa versi mitos yang menjelaskan tentang asal-usul Masyarakat adat Kajang yaitu :


"Bahwa Tomanurung mengendarai burung yang disebut Koajang yang dikendarai oleh Tomanurung atas perintah Turie' A'ra'na (Tuhan). Dari nama burung itulah kemudian menjadi asal-usul nama Kajang. Mitos lain menceritakan bahwa Tamparang Daeng Maloang dan Puabinanga adalah tomanurung, yang muncul disebuah daerah yang bernama "Tombolo" sebagai manusia pertama, pasangan ini tidak mempunyai anak. Pada suatu hari Tamparang Daeng Maloang

ini menemukan wanita yang muncul secara tiba-tiba yang berasal dari seruas bambu. Karena istri pertamanya mandul maka Tamparang Daeng Malloang ini mengawini wanita itu. Dari hasil pernikahannya ini kemudian menjadi asal-muasal Masyarakat Kajang dan dari keturunannya inilah yang menjadi Ammatoa di Kajang".

Selain tentang mitos asal-usul Masyarakat Kajang yang unik, menurut Ammatoa (wawancara 17 Januari 2009) bahwa *iya ngase' pakkaraengan battu ngase ri Kajang iyamintu Gowa, Gowana Kajang, Luhu(Luwu), Luhuna Kajang, Bone, Bonena Kajan".* artinya keseluruhan raja-raja atau penguasa di jazirah Sulawesi selatan semuanya berasal dari Kajang baik raja-raja dari kerajaan Gowa, kerajaan Luwu dan kerajaan Bone. Dengan demikian mitos-mitos tersebut dapat memberikan kebanggaan dan rasa percaya diri kepada seluruh komponen masyarakat, sehingga masyarakat adat Kajang dapat mempertahankan diri terhadap berbagai macam pengaruh-pengaruh yang bisa menyebabkan mereka meninggalkan kebudayaan dan adat istiadatnya. Mitos tersebut juga dapat memupuk aspek sosial yang sangat kuat yaitu rasa kebersamaan yang tercermin dalam falsafah hidup kesederhanaan (*Kamase-maseya*) sehingga melahirkan solidaritas hidup (*sikajangan*). Ammatoa mengungkapkan (wawancara, 17 Januari 2009) bahwa "*Kamase-masea na rie'a assi kajangan*" sehingga Hampir seluruh masyarakat adat kajang menganggap dirinya sebagai suatu sistem kekeluargaan atau satu rumpun (*ru'sana pa'rusanakkang*) yang memiliki konsep identitas budaya Kekajangan.

Dengan Konsep identitas budaya yang demikian maka, penulis beranggapan bahwa solidaritas hidup (*sikajangan*) dan satu rumpun kekeluargaan (*ru'sana pa'rusankkang*) melahirkan legitimasi politik yang kuat dalam langgennya kekuasaan yang dimiliki oleh Ammatoa. Karena konsep identitas budaya itu, menyebabkan tatanan normatif atau hukum-hukum adat menjadi kokoh. Hal tersebut sesuai dengan pandangan **Jurgen Habermas** yang mensyaratkan legitimasi atau otoritas adalah *tatanan normatif harus betul-betul kokoh*⁴⁹. Efek lain yang didapatkan adalah melahirkan perilaku budaya yaitu prinsip kegotong-royongan (*abbulo sipappa'*) dan kebersamaan (*a'lemo sibatu*). Tidak satupun orang Kajang yang menempatkan dirinya sebagai bagian terpisah dari yang lainnya. Jadi, hampir tidak ada masyarakat adat Kajang yang meletakkan kepentingannya diatas kepentingan orang lain. Bahkan Ammatoa sekalipun sebagai pemimpin adat tertinggi selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya diatas kepentingannya sendiri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ammatoa dalam bunyi pasang (wawancara, 17 Januari 2009) yaitu : *punna anne' kamponga lakasiasi, kaminang rioloa kamase-mase iyamintu bohe amma, mingka punna rienakalumannyang, nukaminang ribokoa kalumannyang iyamintu bohe amma*, artinya bahwa jika seandainya kampung ini dilanda kemiskinan, orang yang paling pertama menderita adalah Ammatoa tetapi jika punya kesempatan untuk kaya maka yang terakhir kaya adalah Ammatoa. Aspek kepedulian sosial demikian

⁴⁹ Jurgen Habermas, *Krisis Legitimasi*, (Yogyakarta, Qalam, 2004) hal : 280



menyebabkan kepemimpinan Ammatoa menempati posisi terhormat dan penuh dedikasi yang tinggi bagi masyarakatnya. Selain itu mitos tersebut juga membuat Ammatoa dianggap sebagai keturunan yang memang wajar untuk memerintah karena merupakan keturunan langsung dari manusia pertama yang diutus oleh Tuhan (*Turi'e'A'ra'na*).

Legitimasi kepemimpinan Ammatoa juga didapatkan dari aliran kepercayaan setempat. Menurut Abdul salam (wawancara, 18 Januari 2009) yaitu

"Dalam ajaran pasang kepercayaan ini disebut patuntung. Patuntung Maksudnya seorang yang mempelajari sesuatu Panngissengan (Ilmu Pengetahuan) yang bersumber dari Pasang ri Kajang. atau seorang seorang pelajar yang mencari ilmu sampai ke puncak (hakekat ilmu). Dalam ajaran patuntung Tuhan (Turie'A'ra'na) dijadikan sebagai sentrum yang memberikan tuntunan kepada Ammatoa. Dan dari Ammatoa yang memberikan tuntunan kepada masyarakat yang disimbolkan dalam empat unsur yaitu dunia empat persegi (appa' sulapa'na' linoa) yang terdiri dari unsur-unsur tanah (tana), air (ere'), angin (anging) dan api (pepe'). Dari empat unsur inilah yang harus dijaga keseimbangannya agar tetata kehidupan yang seimbang dan harmonis. Unsur-unsur ini yang dijadikan dasar moral dalam melakukan hubungan kepada Tuhan (Turie'A'ra'na), hubungan kepada sesama manusia dan hubungan kepada alam sekitar.

Patuntung merupakan sumber kebaikan tertinggi yang dari padanya mengalir kebajikan-kebajikan, yang membingkai tatanan kehidupan bersama masyarakat dalam suatu totalitas yang harmonis dan utuh. Inilah beberapa aspek yang menjadikan masyarakat lebih taat dan patuh pada tatanan adat, karena selain diyakini bahwa tatanan adat dapat mengatasi problem kehidupan yang mereka alami, tapi lebih dari itu bahwa ketaatan dan

kepatuhan atas perintah yang diberikan dalam bingkai adat juga merupakan ketaatan terhadap para leluhur mereka.

Selain karena faktor keturunan sebagaimana yang dikatakan oleh Weber sebagai dasar legitimasi seseorang untuk mendapatkan status sosial sebagai pemimpin. Pendapat lain dikemukakan oleh **Kartini Kartono** bahwa *pimpinan informal tradisional mendapatkan Status sosial itu pada umumnya dicapai karena faktor keturunan, kekayaan, taraf pendidikan, pengalaman hidup, kharismatik, maupun jasa-jasanya kepada masyarakat.*⁵⁰

Bagi masyarakat adat Kajang, keturunan merupakan kemutlakan untuk mendapatkan posisi terhormat sebagai Ammatoa. Sebagaimana dikemukakan oleh Ammatca sendiri (wawancara, 17 Januari 2009) bahwa *"nukkullea jari bohe amma iyamintu nubattua rarame na langga"* artinya yang bisa menjadi ammatoa adalah keturunan langsung Ammatoa atau kerabat dekat. Sedangkan kekayaan dan taraf pendidikan sebagaimana yang dikatakan oleh Kartini Kartono sebagai salah satu indikator penunjukan seseorang menjadi pemimpin informal, bagi masyarakat Kajang hal itu tidak berlaku dalam pemilihan Ammatoa. Hal itu diungkapkan sendiri oleh Ammatoa (wawancara, 17 Januari 2009) *"nu jaria'a amma nu kaminang kamase' mase'a"* artinya yang bisa menjadi Ammatoa adalah yang paling sederhana kehidupannya. Hal itu dimaksudkan agar pola hidup demikian

⁵⁰ Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan (Apakah Pemimpin Abnormal itu?)*, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal : 9-10.

menjadi tauladan bagi masyarakatnya. Dan memamerkan kekayaan adalah salah satu pelanggaran dan bertentangan dalam ajaran *pasang ri Kajang*. Kecuali untuk pengangkatan pemangku-pemangku adat yang lain, kekayaan atau pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung untuk menjabat sebagai pemimpin. Sedangkan pendidikan formal tidak menjadi tolak ukur penilaian karena sepanjang pengetahuan penulis bahwa Ammatoa tidak pernah mengenyam pendidikan formal sekalipun. Hanya pendidikan yang diwajibkan adalah pendidikan untuk mengetahui ajaran-ajaran *pasang* yang memang diajarkan sejak masa kanak-kanak. Sedangkan pengalaman hidup dan jasa-jasanya kepada masyarakat di lihat dari aspek sosial, sebagaimana termuat dalam *pasang* yang dijelaskan sebelumnya (wawancara dengan Ammatoa 19 Januari 2009) bahwa : "*punna anne' kamponga lakasiasi, kaminang rioloa kamase-mase iyamintu bohe amma, mingka punna rienakalumannyang, nukaminang ribokoa kalumannyang iyamintu bohe amma*", artinya bahwa jika seandainya kampung ini dilanda kemiskinan, orang yang paling pertama menderita adalah Ammatoa tetapi jika punya kesempatan untuk kaya maka yang terakhir kaya adalah Ammatoa.

2. Legitimasi Kharismatik

Seseorang di angkat menjadi pemimpin karena kharisma yang dimilikinya, menurut **Kartono** bahwa bahwa *pemimpin yang kharismatik adalah pemimpin yang dianggap mempunyai kekuatan ghaib atau kesaktian yang tidak dapat diindra secara ilmiah, dalam pandangan masyarakat Kajang bahwa kharismatik Ammatoa dinilai dari kesaktian yang dimilikinya. Kesaktian itu hanya merupakan simbol yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kepemimpinan Ammatoa. Menurut Ammatoa (wawancara 17 Januari 2009) "kaporean antu rua iyamintu rie' kaporean kulle nitte, rie' to kaporean talakullei nitte". Artinya Kesaktian itu terbagi atas dua yaitu kesaktian yang abstrak dan kesaktian yang nampak. Kesaktian yang abstrak menurut Ammatoa adalah kesaktian yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang sangat susah di selesaikan dan telah mengalami kemandekan, misalnya terjadi pencurian tetapi tidak diketahui siapa yang melakukannya maka jalan terakhir yang dilakukan adalah upacara *Passau*. Menurut Ir Rahim⁵¹ (wawancara, 20 Januari 2009) *Passau* adalah ritual membakar dupa yang diiringi dengan pembacaan mantra. Masyarakat percaya bahwa setelah *Passau* dibakar maka pelaku pencurian akan meninggal. Kesaktian juga didapatkan dari benda pusaka yang dipegang oleh Ammatoa yaitu tombak dan keris yang memang diwariskan secara turun-temurun dari Ammatoa*

⁵¹ Ir. Rahin adalah salah seorang tokoh masyarakat. Dia saat ini bertindak sebagai penyuluh kehutanan yang bertugas dalam wilayah hutan masyarakat Kajang.

pertama hingga saat ini. Menurut salah seorang informan, So'bu⁵² (wawancara, 21 Januari 2009) mengatakan bahwa "*iyapa na' nassa anjari bohe amma punna iya kantiangi badik'a na balira ya battu'a ri bohe amma rioloa, talakullei jari bohe amma puna Tania iyang pake'l*" artinya Ammatoa akan di percaya sebagai pemimpin apabila dia memiliki keris atau tombak warisan Ammatoa sebelumnya dan tidak mungkin menjadi Ammatoa kalau dia tidak memilikinya. Dengan demikian warisan tombak dan keris tersebut adalah salah satu dasar legitimasi atau kepercayaan masyarakat atas keabsahan kepada pemimpin mereka. Kesakralan keris (*badik*) dan tombak (*balira*) tersebut dibuktikan ketika terjadi dualisme kepemimpinan, dimana pertama dalam kesejarahan masyarakat adat terdapat dua pemimpin yang mengklaim dirinya sebagai Ammatoa. Lebih lanjut So'bu (wawancara, 21 Januari 2009) mengatakan bahwa "*anjo badik na baliraya gattang se're corona panjarina ammatoa*" artinya bahwa salah satu yang menegaskannya sebagai Ammatoa adalah karena keris (*badik*) dan tombak (*balira*) warisan ammatoa sebelumnya.

Kesaktian juga dibutuhkan dalam mengobati berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh santet serta juga digunakan dalam memilih ammatoa baru yang dilakukan oleh dewan adat. Dengan kesaktian yang tidak nampak tersebut menegaskan legitimasi yang didapatkan oleh Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi. Menurut Abdul Salam (wawancara, 18 Januari 2009)

⁵² So'bu adalah kepala dusun benteng dan salah tokoh masyarakat dalam wilayah adat Kajang

bahwa dengan kesaktian yang dimiliki oleh Ammatoa atas dasar kepemimpinannya kemudian melahirkan rasa hormat dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Pandangan masyarakat Kajang sesuai dengan dasar legitimasi kharismatik dalam pandangan Weber yang melihat legitimasi kharismatik berdasarkan pada perasaan kagum, hormat, cinta masyarakat⁵³.

Menurut Ammatoa (wawancara, 17 Januari 2009), "*anjo kaporeanga nipake to'ji punna ri'e pangadakkan*" kesaktian yang dimiliki Ammatoa karena memimpin upacara-upacara adat (*anjo kaporeanga nipake to'ji punna ri'e pangadakkan*).

Dalam setiap ritual upacara-upacara yang diselenggarakan oleh Ammatoa terdapat nilai-nilai kepemimpinan dan suritauladan yang ingin ditampilkan kepada masyarakat agar dengan upacara tersebut masyarakat bisa mengambil hikmah dan nilai dari setiap perayaan acara-acara adat.

Menurut Ammatoa (wawancara, 17 Januari 2009) Masyarakat adat Kajang banyak mengenal acara-acara adat banyak ragam dan macamnya diantaranya (adalah :

1. *adampo*, *lajo-lajo* dan *a'dangang* adalah masing-masing upacara adat yang dikhususkan untuk kematian, yang waktu pelaksanaannya dirunut dari satu hari hingga perayaan hari keseratus. Maksud dari acara ini adalah bahwa pemimpin dan

⁵³ Franz Magnis, Suseno *Etika politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1987). h.5

anggota masyarakat yang selalu mengingat mati akan membuat mereka menjadi amanah. Sehingga mereka tidak mengedepankan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat.

2. *Apatumbu katto* adalah acara syukuran yang dilakukan apabila telah melakukan panen raya. Acara ini biasanya dilakukan pertama kali di rumah Ammatowa kemudian berlanjut di areal persawahan. Selanjutnya Ammatoa selaku pemimpin akan melakukan pembagian sedekah kepada masyarakat yang kurang mampu. *Apatumbu katto* dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan (*Turie'A'ra'na*) dan nilai kepemimpinan yang ingin ditumbuhkan adalah rasa sosial atau empati kepada masyarakat kurang mampu dan miskin.
3. *Akkattere* adalah acara khusus yang dilakukan untuk menyambut kelahiran seorang bayi. *Akkattere* juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan (*Tun'e A'ra'na*) dan nilai kepemimpinan yang ingin ditanamkan adalah aspek amanah. Ammatoa beranggapan bahwa bayi merupakan amanah Tuhan kepada manusia yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan merupakan pelanjut generasi dan kelangsungan adat.
4. Upacara besar yang dilakukan oleh Ammatoa selaku pemimpin tertinggi adalah melantik pemangku adat yang bertindak sebagai wakil-wakil Ammatoa dalam menjalankan roda

pemerintahan, acara ini dinamakan *addeppo*. Dalam acara ini seluruh perangkat-perangkat adat turut hadir untuk dilantik dan diambil sumpahnya. Adapun pelantikan dan isi sumpah tersebut, menurut Ammatoa bahwa kata pelantikan adalah :

"Tabe karaeng, annassami bajua ri Kajang assembangi kalompoanga ri butta kamae-masea, ja anjo nikuaya baju-baju bola-bola pallettekanjiintu, na rigattanna na ada', rilambusu'na na karaeng, ri sabbara'na naguru ri pisona nasandro". (Tuanku, telah jelas makna kekuasaan di kajang yang membawa kebesaran di tanah (masyarakat) yang sederhana ini, bahwasanya kekuasaan itu memang berpindah-pindah, dengan ketegasanmu maka engkau menjadi adat, dengan kejujuranmu maka engkau menjadi pemerintah, dengan kesabaranmu maka engkau menjadi guru, dengan lapang dadamu maka engkau menjadi penyembuh)

Sedangkan isi sumpah adalah : *"punna ammuko membara natangarupa sikuaya, anjari appa' nakajariaang, tinanang, erangpole, raungkayu, tu'a a'loloro, ikau mintu"*. Artinya Jika kelak dikemudian hari, engkau (kekuasaan) membawa berkah, yaitu panen berlimpah, kehidupan membaik, hutan terlindungi, tuak yang banyak, maka engkau adalah penguasa selamanya. *Punna ammuko membara, anre' nakajariaang, kamaseangi kulantutta, taniantu giitte' ammentata'*. Artinya jika kelak juga dikemudian hari, engkau (kekuasaan) tidak membawa berkah tersebut, peliharalah dirimu, maka bukan engkau yang penguasa. Isi sumpah dan pelantikan ini juga dilakukan ketika melantik Ammatoa baru.

engkaulah yang penguasa. Isi sumpah dan pelantikan ini juga dilakukan ketika melantik Ammatoa baru.

Dalam masyarakat adat Kajang implementasi nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari legitimasi dan pengakuan masyarakat kepada seseorang yang berkuasa dan apabila hal tersebut tidak terwujud, dalam pasang *disebutkan*

"pucuk-pucuk bollokosek, tangke-tangke sappekosek, sasara baringang tukakko, tumbang deppoko, abbongongko jala-jala, anginungko paccerang, punna nigaunkanggi tannginingaiya, pinruang tuju lapisinu. (Artinya engkau laksana kuncup yang rontok, ibarat anak tangga yang runtuh, ibarat tanggul yang terlanda air bah, terkudung jala, berminumkan air pelimbahan dua kali tujuh turunan tidak akan terwujud apa-apa yang dicita-citakan kalau memperbuat apa yang tidak dikehendaki)⁵⁵.

Begitu besarnya hukum sosial yang harus ditanggung oleh pemimpin yang gagal dalam mengimplementasikan nilai *pasang* dalam masyarakat atau pada saat kepemimpinannya banyak masalah yang muncul dan mengganggu ketertiban masyarakat. Pemimpin yang demikian akan lengser dengan sendirinya dan ditinggalakan oleh pengikutnya. Dalam masyarakat Kajang isi sumpah dan pelantikan itu harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh pemimpin agar tatanan masyarakat dapat terjaga dalam mengatur masyarakatnya.

5. Upacara besar lain adalah upacara *angangro* yaitu ritual yang dilakukan apabila terjadi masalah-masalah yang besar seperti kemarau yang berkepanjangan atau terjadi wabah penyakit

⁵⁵ Op Cit. Mas Alim Katu, Hal : 59

yang melanda masyarakat. *Angannro* adalah salah satu ritual penting yang harus dilkakukan Ammatoa selaku pemimpin tertinggi karena dalam upacara ini biasanya ammatoa akan memperlihatkan kharisma dan kesaktian yang dimilikinya, sehingga dengan kemampuan Ammatoa yang tidak dimiliki oleh orang lain semakin mengukuhkan legitimasi kekuasaan Ammatoa.

Menurut **Inu Kencana**, cara-cara memperoleh kekuasaan disebabkan karena *Reverent power* yaitu perolehan kekuasaan melalui daya tarik seseorang, baik aspek wajah, postur tubuh, penampilan atau sikap seseorang⁵⁴. Aspek-aspek demikian merupakan bagian dari legitimasi kharismatik selain dari kesaktian itu sendiri. Dalam pengamatan penulis semua ciri-ciri itu dimiliki oleh Ammatoa. Aspek wajah, postur tubuh dan penampilan yang dimiliki oleh Ammatoa memang mencerminkan aura kharisma yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Sedangkan sikap yang dimilikinya tidak bisa di lepaskan dari implementasi nilai-nilai *pasang* yaitu ketegasan, kejujuran, kesabaran.

⁵⁴ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung, Mandar Maju)

3. Legitimasi Rasional

Menurut salah seorang informan yaitu Ir.Rahim (wawancara, 17 Januari 2009) yaitu :

"Ada dua dasar legitimasi yang menjadi fondasi kepemimpinan Ammatoa : pertama legitimasi yang didapatkan oleh Ammatoa adalah karena mempraktekkan empat ajaran pasang yang menjadi dasar dalam penentuan pemimpin, yang kedua adalah kepercayaan masyarakat kepada hukum-hukum pasang ri Kajang dalam penerapannya yang dilakukan oleh Ammatoa apabila ada pelanggaran (kasipalli) yang dilakukan oleh masyarakat.

Menurut pandangan Weber hal tersebut yang dijadikan sebagai dasar legitimasi rasional – legal, yaitu berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin⁵⁵.

Menurut Ammatoa (wawancara, 17 Januari 2009) bahwa empat ajaran pasang yang dimaksud telah diamalkan secara turun temurun sejak ammatoa pertama sampai saat ini.

Ajaran pasang yang dimaksud adalah :

- a) Ketegasan (*rigattangna nuada'*), ketegasan yang dimaksud adalah kecermatan Ammatoa dalam memutuskan perkara-perkara adat secara adil, karena dengan ketegasannya sehingga Hukum adat tetap menjadi landasan dalam menyelesaikan tiap perkara. Dengan ketegasan dari ammatoa sehingga nilai-nilai adat istiadat tidak gampang untuk

⁵⁵ Franz Magnis, Suseno *opcit* hal: 5

ditinggalkan oleh masyarakat. Begitu pentingnya masalah ketegasan ini sehingga ajaran pasang banyak menyinggungnya, di antaranya *sallau ri ajoka* berarti bahwa apapun yang dilakukan harus sesuai dengan adat istiadat atau ketentuan-ketentuan dalam *pasang*. Ajaran *pasang* lain yang menyinggung masalah ketegasan adalah *Ammalu ri adahang* maksudnya bahwa harus sesuai dengan jalur atau ketentuan adat, yang apabila segala sesuatu telah disepakati secara bersama maka perkara itu harus dijalankan secara konsekuen dan tidak meninggalkannya sama sekali.

- b) Kejujuran (*ri lambusu'na nakaraeng*) karena kejujurannya maka engkau di angkat menjadi pemimpin. Kejujuran adalah aspek yang tidak kalah penting dari ketegasan. Kejujuran *ammatoa* telah menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-harinya, sebagaimana yang dikatakan sendiri oleh *Ammatoa* bahwa *tala kulle'a accidong Amma punna talalambusu atinku* maksudnya bahwa saya tidak akan menjadi pemimpin kalau kejujuran tidak tertanam kuat dalam benakku, walaupun akibat dari kejujuran akan mengakibatkan sesuatu yang fatal atau mencelakakan diri maka kejujuran harus tetap dipraktekkan sesuai dengan nilai *pasang* yaitu *accidong ri tana eso*, maksudnya dia tetap menanggung dan tidak khawatir dengan akibat dari

kejujuran yang dilakukan oleh Ammatoa, disamping itu Ammatoa juga sangat pro aktif dalam memberikan contoh-contoh kejujuran kepada masyarakatnya.

- c) Kesabaran (*risabbara'na naguru*) bahwa orang sabarlah yang akan menjadi guru atau pendidik. Disinalah peranan Ammatoa yang vital dalam mendidik dan mengajarkan ajaran-ajaran pasang kepada generasi-generasi muda untuk mengetahuinya secara mendalam karena ajaran pasang jumlahnya tidak terhitung dan harus di ajarkan secara bertahap dan membutuhkan lingkak kesabaran yang tinggi. Menurut Ammatoa bahwa *Tana Kamase-masea* (kesederhanaan) tetap terjaga karena kesabaran (*risabbara'na*) pemangku-pemangku adat dalam mengajarkan dan mengamalkan pasang dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Sikap Pasrah atau lapang dada (*riappisona naguru*) dengan sikap pasrahmu maka engkau menjadi penyembuh (dukun). Sikap pasrah ini tercermin dalam sikap tawakkal kepada Tuhan (*Turie'A'ra'na*). apabila sesuatu bencana telah diantisipasi kemudian tetap melanda masyrakat maka segala sesuatu harus dikembalikan kepada Tuhan (*Turie'A'ra'na*).

Empat ajaran pasang ini dibutuhkan dalam hal menyelesaikan sengketa di tingkat komunitas masyarakat karena semuanya terkonsentrasi pada posisi Ammatoa. Lazimnya, Ammatoa yang menjadi penyelesaian utama sengketa di tingkat komunitas. Walaupun selain Ammatoa, terdapat pula tokoh adat yang dalam kesehariannya ikut membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di komunitas. Namun apabila kasus tak dapat diselesaikan maka Ammatoa yang akan mengambil keputusan dalam penyelesaian kasus tersebut. Penerimaan keputusan Ammatoa dan hukum adat didasarkan pada penghormatan masyarakat terhadap mereka, Hal ini disebabkan karena Ammatoa dengan ketegasan hukum adatnya yang berupa *Pasang* dihubungkan dengan sesuatu yang mistik atau kekuatan supranatural, karena masyarakat menganggap bahwa keputusan yang diambil oleh Ammatoa telah mendapat ilham dari Tuhan (*Turie'A'rana*). Dasar pengambilan keputusan terhadap kasus yang ditangani Ammatoa dan perangkatnya tidak mengacu kepada suatu sumber tertulis. Ammatoa hanya mengklaim bahwa dirinya menerapkan hukum adat yang telah di gariskan sejak dulu oleh nenek moyang dan bukan Ammatoa yang membuat hukum adat tersebut tetapi hukum tersebut adalah ketentuan Tuhan (*Turie'A'ra'na*). Denda adalah sanksi yang sangat dijatuhkan dalam keputusan akhir penyelesaian sengketa. Denda biasanya cukup beragam, di Masyarakat Kajang Dalam dimana adatnya masih kuat dianut, hukuman denda yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Menurut Abdul salam (wawancara 18 Januari 2009) bahwa "Untuk pelanggaran kriminal selain akan diselesaikan melalui hukum nasional juga akan diberikan hukum adat. Sedangkan yang sifatnya bukan kriminal akan diselesaikan secara langsung oleh Ammatoa dan pemangku adat.

Hukumannya pun bertingkat yaitu :

- a) Cappa' Babbala yaitu hukuman ringan dengan denda 4 real. Setara dengan satu juta rupiah, misalnya kelalaian seseorang yang menyebabkan salah satu pohon dalam kawasan hutan mengalami kerusakan atau mencuri karena keterpaksaan.
- b) Tangnga Babbala yaitu hukuman sedang dengan 8 real. Nilai hukuman setara dengan 2 juta rupiah, misalnya melakukan penebangan kayu melebihi jumlah yang diperkenankan.
- c) Poko' Babbala yaitu hukuman berat dengan 12 real. Nilai hukuman ini setara dengan 4 juta rupiah, misalnya sengaja memfitnah seseorang, memperkosa, atau menebang kayu (*tabbang kayu*), mengambil udang (*rao doang*), mengambil rotang (*tattang uhe*), membakar lebah (*tunu bani*) kesemuanya ini apabila dilakukan dalam kawasan hutan larangan.

Menurut Ammatoa (wawancara, 17 Januari 2009) semua ketentuan diatas tidak boleh dirubah karena sesuai dengan ketentuan pasang "anre nakulle ri pinra-pinra anu lebba, anre nakulle nigiling, nijarreki tannirokai

artinya sesuatu yang sudah baku tidak dapat diubah, tidak dapat diputarbalikkan, tetapi harus diperkuat dan tidak diperlonggar.

Masyarakat pada umumnya mempercayai dan mematuhi hasil putusan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Ammatoa dan perangkat adatnya. Sehingga apabila Ammatoa dan perangkat adat memberikan putusan atas kasus yang dialami, masyarakat pada umumnya mematuhi putusan tersebut. Mekanisme adat sampai saat ini merupakan pilihan utama dalam penyelesaian kasus yang terjadi di tingkat masyarakat. Penyelesaian sengketa lewat jalur adat tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Kajang Dalam tetapi sering juga dilakukan oleh Masyarakat kajang Luar, hal ini disebabkan karena kepercayaan penuh masyarakat atas keadilan dan kepercayaan masyarakat atas otoritas yang dilakukan oleh Ammatoa beserta pemangku adatnya.

Ammatoa dengan ketegasan hukum adatnya juga akan berdampak pada pengelolaan terhadap berbagai sumber daya alam baik yang ada di darat maupun di laut untuk menghindari kerusakan dan kepunahannya, hal tersebut merupakan wujud nyata dari upaya masyarakat adat untuk melangsungkan kebutuhan ekonomi mereka yang menuntut ketaatan masyarakat secara sukarela, demi melindungi aset yang mereka miliki. Selain itu pula bentuk kehidupan masyarakat yang berhubungan erat dengan alam sekitarnya, diyakini bahwa bila hutan dirusak maka hutan tersebut juga dapat marah dan mendatangkan bencana bagi masyarakat sehingga Ammatoa dan

lembaga adat dalam *Pasangnya* perlu menjaga demi melindungi kelangsungan ekonomi masyarakat dan mencegah timbulnya bencana bagi kehidupan mereka. Untuk menjaga kelestarian lingkungan khususnya dalam pengelolaan hutan sebagai tumpuan perekonomian mereka tercermin dalam ungkapan *pasang* yang berbunyi *anjo boronga iya pa'rie' bosì, nasaba kunnimae anre' pangairang, borongaji nabattui bosì*, artinya hutanlah yang bisa mendatangkan hujan sebab dalam Masyarakat tidak ada irigasi untuk mengairi sawah, jadi hanya hutan yang mereka jadikan sebagai tumpuan untuk mendatangkan hujan bagi areal persawahan mereka dan untuk tanaman-tanaman mereka. Menurut Ir Rahim (wawancara 20 Januari 2009) dalam *pasang* disebutkan juga salah satu tugas dari Ammatoa adalah "*appa'passala iyamintu, tabbang kaju, tatta' uhe, rao doing, tunu bani*" artinya empat tugas Ammatoa yaitu mencegah penebangan kayu, pemotongan rotan, penangkapan udang, dan pengambilan lebah madu. Empat tugas itu dalam rangka mencegah kerusakan hutan dalam kawasan adat. Lebih lanjut Ir Rahim (wawancara, 20 Januari 2009) mengatakan bahwa :

"Masyarakat adat Kajang membagi fungsi hutan dalam dua bagian yaitu hutan tebangan (borong tattakang) dan hutan larangan (borong karama') seperti diungkapkan dalam pasang yaitu iyamintu boronga tabbage rua, borong tattakang akkulle nitabbang kajunna, borong karama'a talakulle nitabbang".

Maksudnya bahwa hutan dikawasan adat terbagi dua yaitu hutan tebangan yang bisa ditebang dan hutan keramat yang dilarang untuk ditebang. Dalam hutan tebangan (*borong tattakang*) mengandung aspek

ekonomi yang berkaitan dengan produksi yang dikonsumsi sendiri oleh masyarakat. pengelolaannya pun harus terbagi pilih dan mendapat petunjuk dari Ammatoa dan pemangku-pemangku adat. Pola kerjasama yang terjalin antara Ammatoa, pemangku adat dengan masyarakat tetap dalam bingkai permusyawaratan sebagai wujud penghormatan masyarakat terhadap pemimpin mereka.

Menurut Ir Rahim (wawancara, 20 Januari 2009) bahwa *"Dalam mengatur pengelolaan hutan seharusnya pemerintah Bulukumba membuat aturan perda khusus agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan Ammatoa dan dan Pemerintah Kabupaten"*.

Lebih lanjut Ir Rahim mengatakan bahwa : *Pernah terjadi pertentangan antara kebijakan dan pemda dalam pengelolaan hutan produksi, akibatnya yang dirugikan adalah Masyarakat Adat"*

Oleh sebab itu pemerintah daerah seharusnya responsif dan tidak semena-mena dalam mengatur kewenangan masyarakat adat agar keutuhan masyarakat adat tetap terjaga. Pemerintah seharusnya memberikan ruang yang luas dan tidak mencampuri dalam pengelolaan hutan agar hutan tersebut tetap terjaga dan kelangsungan ekonomi masyarakat tidak terganggu.

Dalam konteks pemerintahan, legitimasi tradisional, kharismatik dan rasional yang didapatkan oleh Ammatoa telah memuat aspek sosial, aspek hukum, aspek politik, aspek agama dan kepercayaan, aspek mitos dan aspek ekonomi. Hal tersebut menyebabkan fungsi-fungsi kepemimpinan Ammatoa

dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan legitimasi yang kuat di masyarakat adat Kajang. Hal ini dimaksudkan agar dapat menyatukan seluruh komponen masyarakat dalam satu kesatuan yang tidak tergoyahkan.

B. STRUKTUR KELEMBAGAAN

Menurut Ammatoa (wawancara, 17 Januari 2009) bahwa struktur kelembagaan masyarakat adat di Kajang harus berlandaskan pada *pasang* yaitu: *appai pattungkulu'na langi'a na paggentunna buttaya ri Kajang, iyamintu* : artinya ada empat yang menjadi landasan dan ketetapan di Tanah Kajang yaitu :

4. *Karaeng (Pemerintah)*
5. *Ada' (Adat)*
6. *Sanro (Dukun)*
7. *Guru (Pendidik)*

Semua peran yang di mainkan oleh Kelembagaan adat sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya, menurut Ammatoa (wawancara, 17 Januari 2009) adalah berlandaskan pada empat ajaran pasang yaitu :

1. *Lambusu'naji na Karaeng* artinya Karena kejujuranmu maka engkau menjadi pemerintah.
2. *Sabbara'naji na guru* artinya karena kesabarannya maka engkau menjadi guru.



3. *Gattang naji na ada'* artinya karena ketegasanmu maka engkau menjadi adat.
4. *Appisonaji na sanro* artinya karena kepasrahanmu maka engkau menjadi dukun.

Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *pasang* tersebut menurut Ammatoa tidak bisa diubah dan harus demikian adanya. Ketentuan empat ajarang *pasang* tersebut merupakan kewenangan yang harus dijalankan oleh para pemangku adat dalam struktur kelembagaan Ammatoa.

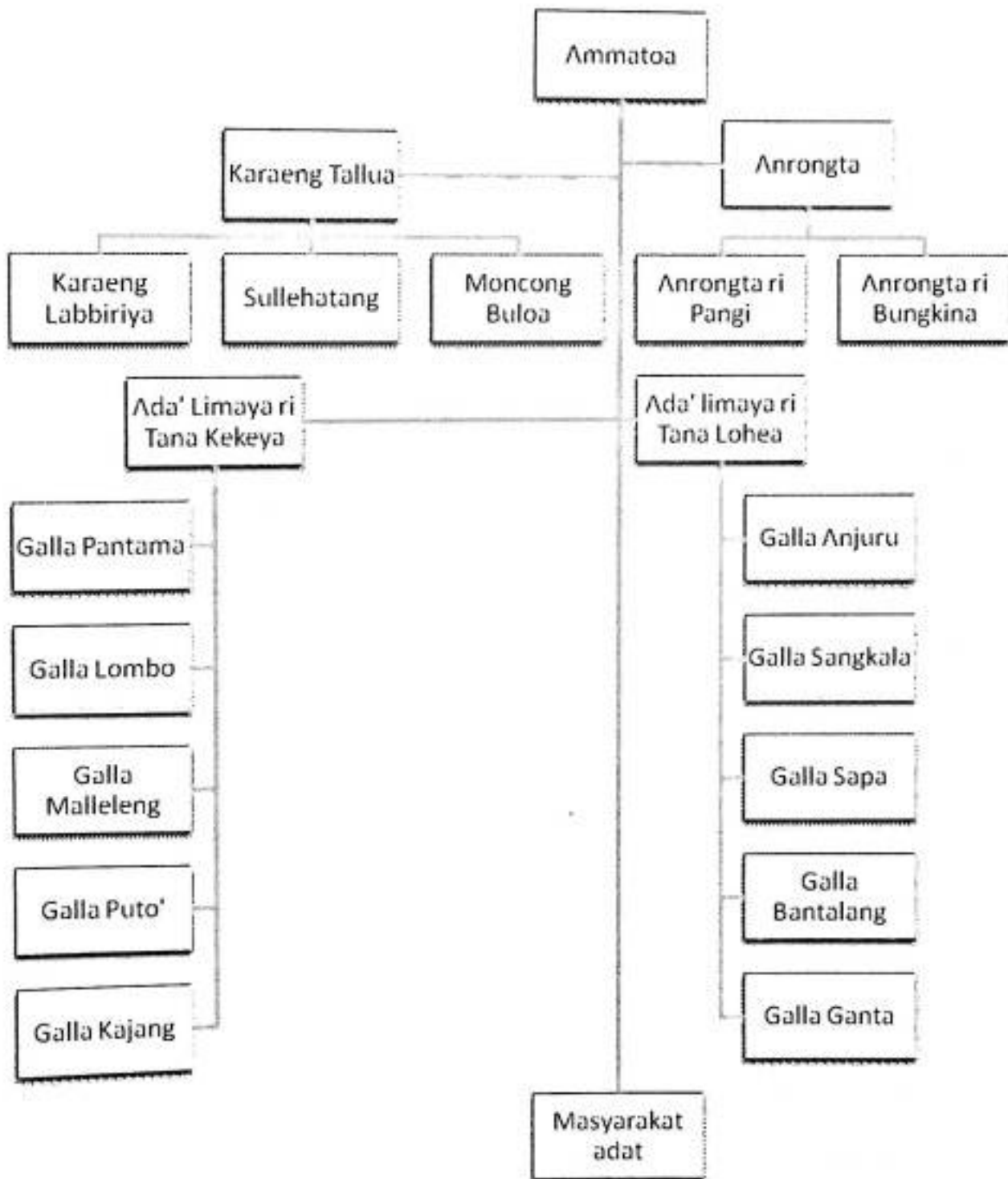
Menurut Abdul Salam (wawancara, 18 Januari 2009) bahwa :

"Dalam struktur pemerintahan formal kedudukan Ammatoa telah digantikan oleh Camat sebagai kepala pemerintahan dalam wilayah kecamatan Kajang, sedangkan pemangku-pemangku adat yang lain dalam struktur kelembagaan Ammatoa telah diintegrasikan sebagai jabatan kepala-kepala desa dan kepala kampung dalam lingkungan wilayah kecamatan Kajang".

lebih lanjut Abdul Salam mengatakan bahwa :

"Fungsi dan kewenangan yang dilakukan oleh kepala-kepala desa yang juga selaku pemangku adat (Galla) tidak mengalami tumpang tindih sama sekali, hal ini disebabkan karena antara ketentuan hukum formal dengan ketentuan hukum informal berjalan saling mengikat satu sama lain. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat baik tindakan pidana maupun perdata akan di proses secara hukum formal dan hukum adat.

Menurut Ammatoa (wawancara 17 Januari 2009) struktur kelembagaan menurut pasang adalah sebagai berikut :



1. Karaeng Tallua

Karaeng Tallua berfungsi sebagai mitra kepemimpinan Ammatowa. Yang lebih berfokus dalam pengembangan dan pelestarian adat istiadat masyarakat Kajang. Karaeng Tallua dalam pemerintahan formal berkedudukan sebagai camat Kajang, wakil camat Kajang, dan kades Tambangan, yang statusnya sebagai aparatur negara yang mengurus masalah kenegaraan yang ada kaitannya dengan adat istiadat.

- a) Karaeng Labbiriya adalah pimpinan tertinggi pemegang *kalabbirang* dalam lembaga adat karaeng Tallua. Pada zaman dahulu, sebelum terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia, Karaeng Labbiriya di pegang oleh Karaeng Kajang yang berkedudukan sebagai Raja dalam Kerajaan Kajang. Untuk saat ini Fungsi dan perang Karaeng Labbiriya dipegang oleh Camat Kajang. Untuk memegang fungsi sebagai karaeng Labbiriya maka harus dilantik terlebih oleh Ammatoa dan mempunyai peranan sebagai penasehat atau mengurus masalah kenegaraan yang ada hubungannya dengan masalah adat.
- b) Sullehatang adalah berfungsi sebagai pengganti camat Kajang (*Karaeng Labbiriya*) dalam berbagai upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat Kajang.

- c) Moncong Bulowa adalah salah satu bagian dari Karaeng Tallua yang berfungsi sebagai pengganti Karaeng Labbiriya dan sullehatang apabila berhalangan hadir dalam acara-acara adat.
2. Dewan Adat Lima (Ada' limaya).

Ada' Limaya' adalah dewan adat yg berada dalam kawasan adat, yang membantu Ammatoa dalam melaksanakan tugas-tugas Ammatoa khusus dalam Kawasan adat.

a) Ada' Lima ri Tana Kekeyya

- 1) Galla Pantama adalah pembantu Ammatowa dalam mengurus segala bentuk permasalahan adat yang statusnya sebagai kepala pemerintahan dalam struktur lembaga adat Ammatowa. Sekarang Galla Pantama dijabat oleh Kepala desa Possi Tana.
- 2) Galla Lombo' adalah pembantu Ammatoa dalam mengurus segala bentuk permasalahan adat yang dimasa lalu peranannya mengurus masalah daerah-daerah penaklukan yang dilakukan oleh Ammatowa. Saat ini fungsinya menagani urusan perbelanjaan dalam kawasan adat. Sekarang Galla Lombo' dijabat oleh kepala desa Tana Towa.

- 3) Galla Malleleng adalah pembantu Ammatowa dalam mengurus permasalahan yang berkenaan dengan perikanan atau hasil-hasil laut. Sekarang Galla Malleleng di jabat oleh Kepala Desa Malleleng.
- 4) Galla Puto' adalah pembantu Ammatowa yang diangkat sebagai juru bicara. Setiap masalah-masalah adat istiadat Kajang di komunikasikan antara Ammatowa dengan Galla Puto'.
- 5) Galla Kajang adalah pembantu Ammatowa yang mempunyai peranan mengurus segala bentuk keagamaan dalam kawasan adat Kajang maupun kawasan adat kajang luar.

b) Ada' Lima ri Tana Lohe.

Dewan adat di Tana Lohe merupakan lembaga adat yang berada di luar kawasan adat Kajang dan berfungsi sebagai lembaga perwakilan adat bagi masyarakat yang hidup dikawasan adat Kajang luar. Karena sebagian masyarakat yang tinggal diluar kawasan adat masih tetap patuh pada *pasang* (hukum) dan masih menganggap Ammatowa sebagai pemimpin mereka.

- 1) Galla Anjuru yang di di Dewan Adat di Tana Lohe di angkat sebagai penghulu Galla atau galla Utama yang bertindak sebagai pemimpin Dewan Adat di Tana Lohe.
- 2) Galla Sangkala adalah dewan adat yang mengurus masalah perbelanjaan untuk membiayai upacara-upacara adat yang diselenggarakan oleh Ammatoa.
- 3) Galla Sapa adalah dewan adat yang mengurus masalah-masalah Kriminal yang dilakukan oleh masyarakat diluar kawasan adat yang ingin permasalahannya diselesaikan secara adat.
- 4) Galla Bantalang adalah dewan adat yang bertindak sebagai juru bicara Ammatoa bagi masyarakat Kajang luar.
- 5) Galla Ganta adalah dewan adat yang menangani masalah pengairan dan juga bertindak sebagai kepala perlengkapan.

3. Anrongta ri Pangi dan Anronta ri Bungkina

Anrong berarti ibu dan di tambah dengan sufiks "ta" artinya kita punya. Jadi *anrongta* artinya ibu kita. Di kawasan adat Kajang dikenal dua *Anrong* yaitu *Anrongta ri Pangi* dan *Anrongta ri Bungkina*. Kedudukan Anronta tersebut di kawasan adat Kajang sangat di hormati karena angapan mereka seorang *anrong* manusia lahir diatas

di atas dunia ini. *Anrongta* menurut mereka dianggap sebagai asal muasal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Kedudukan dan tanggung jawab *Anrongta* dalam budaya Kajang tidak hanya membela hak-hak kaumnya, tetapi juga sebagai penasehat dan pengwas kepemimpinan Ammatowa. Dengan demikian, kedudukannya sebagai penasehat Ammatowa. Selain itu, *Anrongta* juga berperan aktif dalam seleksi calon Ammatowa. Merekalah yang menentukan terlebih dahulu calon-calon Ammatowa kemudian melakukan proses pemilihan dan pengukuhan. Pada setiap upacara adat *Anrongta* selalu dihadirkan untuk menemani Ammatowa, karena mereka dianggap ibu dari seluruh masyarakat adat Kajang⁵⁶.

Dilihat dari struktur kelembagaannya Ammatoa mempunyai perangkat-perangkat adat yang mempunyai peranan khusus dan tanggung jawab yang besar. Fungsi *Karaeng Tallua*, *Ada' limaya ri Tana Kekeya*, *Ada' limaya ri Tana Lohe* dan *Anrongta* menurut Aziz Tambi (wawancara, 19 Januari 2009) bahwa : "*fungsi pemangku adat ini masih sesuai dengan kondisi sekarang dan menjadi bagian dari lembaga adat Ammatoa yang tetap berperan besar dalam menjaga masyarakat dan menjalankan amanah dari Ammatoa*".

⁵⁶ Penjelasan tentang struktur kelembagaan adat adalah hasil wawancara dengan Ammatoa dan Abdul salam selaku Kepala desa Tana Toa yang dilakukan pada tanggal 17 dan 18 Januari 2009.

Mereka tetap menjalankan fungsinya secara efektif dan menjadi pemimpin-pemimpin yang tetap dihormati. Ditingkatan komunitas, mereka menjadi penyelesaian utama untuk tiap-tiap masalah sebelum diserahkan kepada pemimpin tertinggi mereka yaitu Ammatoa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Legitimasi Kepemimpinan

Ammatoa sebagai pemimpin tertinggi dalam masyarakat adat di Kajang mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat.

- a) Legitimasi tradisonal yang didapatkan ammatoa adalah karena faktor keturunan dan aliran kepercayaan masyarakat setempat yaitu kepercayaan *patuntung*, sehingga masyarakat menganggap Ammatoa dianggap sebagai wakil hidup dari para leluhur dan wakil Tuhan (*Tun'e A'ra'na*).
- b) Legitimasi kharismatik Ammatoa karena faktor kesaktian, kesaktian diukur dari kepemilikan benda pusaka keris (*badik*) dan tombak (*balira*), dan kemampuan Ammatoa memimpin acara-acara adat serta kesaktian berhubungan dengan ilmu santet, kharisma Ammatoa juga berhubungan dengani aspek wajah, postur tubuh, penampilan atau sikap.
- c) Legitimasi rasional di dapatkan Ammatoa sebagaimana termuat dalam *pasang* yaitu ketegasan (*rigatangna nuada'*), Kejujuran (*ri lambusu'na nakaraeng*), Kesabaran (*risabbara'na naguru*) dan Sikap Pasrah atau lapang dada (*riappisona naguru*).

Dalam konteks pemerintahan, legitimasi tradisional, kharismatik dan rasional yang didapatkan oleh Ammatoa telah memuat aspek sosial, aspek hukum, aspek politik, aspek agama dan kepercayaan, aspek mitos dan aspek ekonomi. Dengan terpenuhinya beberapa aspek tersebut menyebabkan fungsi-fungsi kepemimpinan Ammatoa dapat berjalan dengan baik dan menyatukan seluruh komponen masyarakat dalam satu kesatuan yang tidak tergoyahkan.

2. Struktur Kelembagaan

Dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya, Ammatoa di bantu oleh beberapa pemangku-pemangku adat. *Karaeng Tallua* (*Karaeng Labbiriya, Sellehattang dan Moncong Bulowa*) saat ini berfungsi statusnya sebagai aparatur negara yang mengurus masalah kenegaraan yang ada kaitannya dengan adat istiadat. *Angronta* (*anrongta ri pangi dan anrongta ri Bungkina*) kedudukannya sebagai penasehat Ammatowa. Selain itu, *Anrongta* juga berperan aktif dalam seleksi calon Ammatowa. Merekalah yang menentukan terlebih dahulu calon-calon Ammatowa kemudian melakukan proses pemilihan dan pengukuhanannya. Sedangkan dalam struktur kelembagaan. *Ada' ri Tana Kekeya* (Dewan adat di Tana Keke) adalah perangkat adat yang membantu Ammatoa dalam melaksanakan tugas-tugas Ammatoa, khusus dalam Kawasan adat. Sedangkan *Ada' ri Tana Lohea* (Dewan Adat di Tanah Lohe) adalah dewan adat yang berfungsi sebagai

lembaga perwakilan adat bagi masyarakat yang hidup dikawasan adat Kajang luar. Karena sebagian masyarakat yang tinggal diluar kawasan adat masih tetap patuh pada *pasang* (hukum) dan masih menganggap Ammatowa sebagai pemimpin mereka. Perangkat-perangkat adat ini tetap menjalankan fungsinya secara efektif dan tetap berperan besar dalam kepemimpinan Ammatoa.

B. Saran

Ammatoa mempunyai Legitimasi yang kuat dan tatanan yang kokoh dalam mengatur masyarakatnya hanya saja Ammatoa kadang berbenturan dengan Pemerintah Daerah Bulukumba khususnya dengan Dinas Kehutanan dalam hal pengaturan Hutan. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Bulukumba seharusnya membuat perda yang khusus mengenai masyarakat adat Kajang utamanya menyangkut kehutanan. Hutan merupakan aspek yang paling penting karena menyangkut aspek ekonomi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Abdulsyani, 2002, **Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan**. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Aminah, Sitti, 1989, **Nilai-Nilai Luhur Budaya Spritual Masyarakat Ammatoa Kajang**. Kanwil Depdikbud Sul-Sel. Ujung Pandang.
- AS. Hornby, 1983, **Oxford Advanced Dictionary**, Oxford, Oxford University Press.
- Bryan S. Turner, 1991, **Religion and Social Theory**. London :SAGE publications Ltd.
- Faisal, Sanapiah, 2003, **Format-format Penelitian Sosial**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1987, **Etika politik Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haryatmoko, 2004, **Etika Politik dan Kekuasaan**, Kompas, Jakarta.
- Horton, Paul B. dan Chester L, Hunt. 1984, **Sociology, Sixth Edition**. McGraww-Hill Book Company; Sidney.
- Inu Kencana Syafie, 2002, **Ilmu Pemerintahan**, Mandar Maju, Bandung.
- Jurgen Habermas, 2004, **Krisis Legitimasi**, Qalam, Yogyakarta
- Kartono, Kartini, 1992, **Pemimpin dan Kepemimpinan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koetnjaraningrat, 1974, **Manusia dan Kebudayaan di Indonesia**, PT Jambatan, Jakarta.
- _____, 1997. **Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- , 1972, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Mas Alim Katu. 2005. *Tasawuf Kajang*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Miriam Budiharjo, 1994, *Kuasa dan Wibawa*, Gramedia, Jakarta.
- , 1993, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta.
- Pamudji. S, 1982, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Permadi K, 1996, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Selo Soemardjan, dkk, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi (Kumpulan Tulisan)*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2005, *Administrasi Pembangunan (Konsep Dimensi dan Strateginya)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1996, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Soetopoe, Soemantri. , 1984, *Kepemimpinan dan Supervisi pendidikan*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sutarto, 1995. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*, GM University Press, Yogyakarta.
- Yuki, Garry, 1998, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, PT. Perhalindo, Jakarta
- Zuriah, Nurul. 2006, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan; Teori-Aplikasi*, Jakarta, PT Bumi Aksara.

2. INTERNET

Ter Harr, *Masalah-masalah hukum adat*, (www.google.com) diakses 9 Januari 2009

World Agroforestry Centre (ICRAF)., Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)., Forest Peoples Programme (FPP), 2003, *Satu Yang Kami Tuntut Pengakuan*, Online (<http://www.google.com>), diakses 10 Juli 2008.

3. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Agraria/Ka BPN no. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat